



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 47 DESEMBER 2023



Kematangan Demokrasi Pertanggung Ketahanan Nasional

Seputar Kita

Berkolaborasi dengan PYC dan NUS, Lemhannas RI Gelar Program Khusus Pematapan Pimpinan Daerah Pertama Tahun 2023

Profil Pejabat

Komisaris Jenderal Polisi
Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.:
Selalu Bekerja dengan Sungguh-
Sungguh dan Selesaikan Tugas
Tanpa Menunda

Opini

Upaya Diplomasi
Pertahanan Indonesia
dalam Menyelesaikan
Perang Rusia-Ukraina

Ekonomi Tetap Tumbuh Positif

Triwulan III 2023

Badan Pusat Statistik (BPS)
Melaporkan ekonomi Indonesia
triwulan III 2023 tetap tumbuh
positif sebesar

4,94%

terhadap triwulan III 2022

Produk Domestik Bruto (PDB)
Harga Berlaku

Rp 5.296,0 Triliun

Pertumbuhan Ekonomi 2022-2023



● Berdasarkan Y-ON-Y

● Berdasarkan Q-TO-Q



PELINDUNG/PEMBINA MAMAN FIRMANSYAH
PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.
PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI
SURATNO

REDAKTUR KUSYUWONO
PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,
CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA
FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA
SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA
SAHLA ADIWIDYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,
NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTRI

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110
Telp. (021) 3832470
Email: redasihumaspubbit@gmail.com
Instagram: @lemhannas_ri
Facebook: @lembagaketahanannasionalri
Twitter: @LemhannasRI
Youtube: Lemhannas RI
TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI
DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Majalah ini dapat diunduh di:



Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 47, Desember 2023 telah terbit di tengah-tengah kita.

Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan dalam berbagai rubrik. Diharapkan berbagai sajian informasi dalam Majalah Swantara ini dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk laporan utama pada edisi kali ini, jelang pemilu 2024, konsolidasi demokrasi menjadi topik hangat mengingat penelitian dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengharuskan Indonesia perlu melakukan tujuh kali pemilihan umum hingga akhirnya mencapai kematangan demokrasi pada tahun 2029. Dengan matangnya demokrasi nanti, diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Diharapkan sajian laporan utama ini dapat menambah wawasan para pembaca.

Pada rubrik lain, Majalah Swantara terdapat rubrik Seputar Kita yang menyajikan informasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan Lemhannas RI. Sementara rubrik profil mengangkat profil sejumlah pejabat Lemhannas RI yang baru saja dilantik dan Pegawai yang menjadi teladan di Lemhannas RI sehingga bisa mengenal lebih dekat dan menjadi inspirasi bagi pembaca. Selain itu, tim redaksi juga menyajikan berbagai rubrik seperti Hot News dan Ragam yang dapat menjadi pilihan referensi yang dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya. Tim redaksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 47, Desember 2023. Semoga, Majalah Swantara bisa memberikan banyak manfaat serta berkesan di hati para pembaca. *Homines, dum docent, discunt!*

Om Shanti Shanti Shanti Om
Namu Buddhaya
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA Kematangan Demokrasi, Pertanggung Ketahanan Nasional

SEPUTAR KITA



12 Lemhannas RI Diskusikan Urgensi Evaluasi UU TNI

13 Sejumlah Prajurit TNI dan Personel ASN Lemhannas RI Menerima Kenaikan Pangkat



14 PPSA 24 Lemhannas RI Resmi Ditutup

16 Jelang Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2023, Lemhannas RI Selenggarakan Gebyar Wawasan Kebangsaan



18 Berkolaborasi Dengan PYC dan NUS, Lemhannas RI Gelar Program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah

20 Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-78

SEPUTAR KITA



- 21 Seminar Lanskap Strategis Asia Tenggara di Era Geopolitik 5.0
- 22 Lemhannas RI Selenggarakan Sosialisasi Penyusunan LAKIP
- 24 Lemhannas RI Diskusikan Posisi Indonesia di Tengah Geo-Ekonomi AS



- 26 Sejumlah Jajaran PT Pertamina Mengikuti Pematapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI
- 28 Sambut HUT KORPRI Ke-52, Lemhannas RI Kembali Gelar Penyuluhan Kesehatan
- 30 FGD Tentang Adaptasi Teknologi dan Inovasi Guna Menghadapi Krisis Global



- 32 Plt. Gubernur Lemhannas RI Bertindak Sebagai Pembicara Kunci pada Webinar Nasional IKABNAS
- 34 HUT KORPRI Ke-52, Plt. Gubernur Lemhannas RI: Jaga Netralitas Pemilu 2024

OPINI



- 36 Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menyelesaikan Perang Rusia-Ukraina
- 38 Implementasi Nilai Keharmonisan dan Gotong Royong Guna Menyediakan Energi untuk Seluruh Negeri dengan Core Value Akhlak
- 40 Pemanfaatan Pesawat Tak Berawak (UAV) Ketinggian Tinggi, Daya Tahan Lama (HALE) untuk Kepentingan Nasional

PROFIL PEJABAT



- 42 Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.: Selalu Berkerja dengan Sungguh-sungguh dan Selesaikan Tugas Tanpa Menunda

PROFIL PEGAWAI



- 46 Amara Ayu Gaga: ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

HOT NEWS



- 48 Peresmian PLTS Cirata untuk Mendukung Industri Energi Hijau
- 49 Presiden Jokowi Hadiri COP28 Tegaskan Komitmen Membangun Negara Makmur dan Berkelanjutan

RAGAM



- 50 Desa Konoha itu Bernama Lembah Harau
- 51 Ternyata Putri Malu Punya Ingatan



52 GALLERY



Kematangan Demokrasi

Pertanggungjawab Ketahanan Nasional

Pada tahun 2024, Indonesia bersiap-siap menghadapi momentum krusial dalam ranah politik dengan digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan. Pemilu akan menentukan pilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. Sementara itu, Pilkada untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota dijadwalkan akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Perhelatan politik serentak ini menjadi sorotan utama, memunculkan dinamika yang kental dalam peta politik Indonesia. Partai-partai politik tengah sibuk merumuskan strategi kampanye demi meraih dukungan massif dari masyarakat. Calon presiden dan wakil presiden, bersama dengan calon legislatif, berupaya meyakinkan pemilih bahwa visi dan program mereka menjadi pilihan terbaik untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Suasana politik yang memanas diiringi dengan upaya keras para kandidat untuk memenangkan hati dan suara rakyat menciptakan gejolak yang patut diikuti dalam perjalanan demokrasi tanah air.

Isu-isu krusial seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan menjadi fokus sentral dalam panggung kampanye politik. Para kandidat yang berlaga dalam kontestasi politik bersaing untuk menyajikan solusi konkret guna mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Disisi lain, peran media sosial tidak dapat diabaikan, memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan membentuk opini publik. Pemilih diharapkan untuk mengadopsi sikap kritis dan selektif dalam menyaring informasi, bertujuan agar keputusan yang diambil lebih bijaksana.

Meskipun polarisasi politik dapat menjadi kenyataan, dengan debat antarpemilihan dari berbagai kandidat yang memanas, harapannya adalah agar proses demokrasi tetap berlangsung

secara damai dan partisipasi masyarakat terus meningkat. Pemilu serentak 2024 di Indonesia dianggap sebagai momentum krusial dalam upaya konsolidasi demokrasi di negara ini. Dengan segala dinamika dan kompleksitasnya, harapannya adalah bahwa demokrasi akan tetap menjadi pilar utama dalam mengarahkan arus masa depan bangsa ini.

7 Pemilu Demokratis

Dalam rekomendasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyoroti perlunya Indonesia menjalani tujuh putaran pemilihan umum secara berkesinambungan untuk mematangkan demokrasi. Menurut studi tersebut, melalui pelaksanaan pemilu yang konsisten, Indonesia dapat mengukuhkan praktik demokrasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi aktif masyarakat dalam dinamika politik.

Proses mencapai target tersebut melibatkan beberapa tahapan, mulai dari inisiasi, instalasi, konsolidasi demokrasi, hingga pencapaian objektif demokrasi yang matang. Pasca-era reformasi, di mana Indonesia melepaskan diri dari belenggu orde baru, terjadi perubahan signifikan dalam sistem politik.

Kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menjadi landasan bagi tahap inisiasi demokrasi yang lebih demokratis, termanifestasi dalam pemilu pertama pada tahun 1999. Transformasi legislasi ini menjadi pendorong penting menuju demokrasi yang lebih matang bagi Indonesia.

Tahap instalasi demokrasi mencapai puncaknya pada pemilihan umum kedua pada tahun 2004 dan ketiga pada tahun 2009. Pada tahap ini, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara

langsung oleh rakyat diperkenalkan pada tahun 2004, menggambarkan pergeseran menuju partisipasi langsung dalam proses demokrasi. Selama periode ini, partisipasi masyarakat terus meningkat, mencerminkan semangat berdemokrasi yang mengakar dalam kesadaran rakyat.

Pemilu keempat pada tahun 2014, kelima pada tahun 2019, dan keenam pada tahun 2024 diidentifikasi sebagai tahap konsolidasi demokrasi. Tahap ini diprediksi akan lebih panjang dibandingkan dengan dua tahap sebelumnya, mengingat kompleksitas yang timbul sebagai dampak dinamika politik, ekonomi, dan aspek sosial budaya masyarakat.

Dengan enam pemilu yang telah sukses dilaksanakan, menjadi langkah-langkah penting dalam pengukuhan nilai-nilai demokrasi dan penguatan institusi-institusi terkait. Harapannya adalah bahwa konsolidasi demokrasi yang dilakukan selama periode ini telah membawa Indonesia menuju tingkat kedewasaan demokrasi yang memadai. Sebagai proyeksi ke depan, diantisipasi bahwa pada pemilu 2029, Indonesia akan mencapai tingkat kematangan demokrasi yang lebih tinggi, didorong oleh kesinambungan upaya dan komitmen untuk memperkuat pondasi demokrasi di tanah air.

Konsolidasi Demokrasi

Pemilu kelima pada tahun 2019 telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, membawa warisan berharga yang kini diteruskan dalam pemilu keenam dan ketujuh. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membimbing Indonesia menuju tahap konsolidasi demokrasi yang lebih mantap pada tahun 2024. Saat ini, Indonesia masih berada dalam proses konsolidasi demokrasi yang terus berlangsung, dan Pemilu 2024 dianggap sebagai momentum kritis yang menguji kesiapan bangsa untuk meraih kedewasaan demokrasi.

Namun, evaluasi dari lembaga EIU (Economist Intelligence Unit) Democracy Index (2023) menunjukkan bahwa kondisi



Foto. Humas KPU Surabaya

demokrasi di Indonesia, meskipun berada di atas rerata global, masih relatif belum matang. Indonesia dinilai berhasil dalam aspek proses elektoral, namun terdapat kelemahan dalam aspek budaya politik. Penilaian EIU selama sembilan tahun terakhir menggambarkan fluktuasi dalam kondisi demokrasi nasional, dengan kecenderungan penurunan. Titik puncak Indeks Demokrasi Indonesia terjadi pada tahun 2015.

Sebagai bagian dari tahapan konsolidasi, penting bagi Indonesia untuk menanggapi evaluasi tersebut dengan serius, mengidentifikasi titik lemah, dan berupaya memperkuat pondasi demokrasi. Melalui upaya bersama dan komitmen yang kokoh, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi, mengatasi tantangan, dan memandu negara menuju taraf demokrasi yang lebih matang dan stabil.

Menurut Freedom in the World Index dari Freedom House (2023), Indonesia secara keseluruhan memiliki skor Indeks Kebebasan yang berada di atas rerata global. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memenuhi hak politik masyarakat, meskipun masih menunjukkan ketertinggalan dalam aspek kebebasan sipil.

Beberapa catatan kritis dari Freedom House mencakup penanganan tren kekerasan di Papua, kasus penuntutan

hukum terhadap aktivis berbasis UU ITE, dan persekusi terhadap kelompok minoritas. Isu-isu ini menjadi sorotan dalam evaluasi kebebasan di Indonesia. Dalam konteks global, tren kebebasan cenderung memburuk sejak 2005, di mana lebih banyak negara mengalami penurunan skor daripada perbaikan kondisi kebebasan. Meskipun demikian, Indonesia tetap berada di atas rerata global dalam skor Indeks Kebebasan.

Meskipun kondisi demokrasi di Indonesia dinilai di atas rerata global, evaluasi menunjukkan bahwa negara ini masih belum mencapai kematangan demokrasi secara keseluruhan. Kelebihan pada dimensi hak politik, terutama dalam proses elektoral, sejalan dengan kelemahan pada aspek kebebasan sipil dan budaya politik. Untuk mewujudkan visi menjadi negara demokrasi matang, penting untuk terus memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan normal, sambil mengatasi tantangan yang muncul untuk memperkuat kebebasan sipil dan budaya politik.

Melihat periode 10 tahun terakhir, disadari bahwa lebih banyak negara mengalami regresi daripada perbaikan dalam kualitas demokrasi. Meskipun demikian, pembangunan demokrasi di Indonesia menunjukkan tren positif ketika ditarik sejak awal kemerdekaan. Meskipun ada pasang-surut, Indonesia memiliki catatan positif dalam perjalanan

demokrasinya.

Di tengah tren global yang menunjukkan regresi demokrasi, Indonesia dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan normal. Hanya dengan menjaga kestabilan dan integritas proses demokrasi, visi Indonesia sebagai negara demokrasi matang bisa diwujudkan. Namun, perlu diakui bahwa Lemhannas RI mencatat adanya kecenderungan regresi demokrasi, yang juga tercermin dalam indeks yang dikeluarkan oleh lembaga kajian seperti Freedom House Index.

Sementara berdasarkan indeks ketahanan nasional per November 2023 menunjukkan bahwa gatra politik berada pada kategori Cukup Tangguh dengan skor 2,83. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat variabel dalam gatra politik yang berada di kategori Rawan yaitu variabel kapasitas pemerintah dengan skor 1,8. Sementara ada sejumlah variabel yang perlu mendapat perhatian juga yang berada pada kategori Kurang Tangguh, seperti hubungan pusat-daerah dan antar daerah (skor 1,94), fungsi pengawasan (skor 2,33), dan kepastian hukum (skor 2,10). Hal serupa juga terjadi pada variabel hak-hak sipil dalam gatra sosial budaya, yang juga tergolong dalam kategori Rawan dengan skor 1,43.

Keadaan ini menunjukkan bahwa ada tantangan nyata dalam memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024. Variabel-variabel yang dinilai rawan dan kurang tangguh tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperbaiki hubungan pusat-daerah, meningkatkan fungsi pengawasan, memastikan kepastian hukum, dan memperkuat hak-hak kebebasan sipil.

Penting untuk memandang Pemilu 2024 sebagai momentum penting dalam menghadapi tantangan besar menuju demokrasi yang semakin matang di tengah kecenderungan regresi demokrasi saat ini. Dalam konteks ini,

penting untuk terus mengkaji berbagai faktor untuk mengatasi tantangan tersebut dan menjaga momentum positif pembangunan demokrasi harus tetap menjadi prioritas, sehingga Indonesia dapat tetap melangkah maju menuju pencapaian tujuannya sebagai negara demokrasi yang matang. Dengan upaya konkret dan kolaboratif, Indonesia dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan memperkuat pondasi demokrasi untuk masa depan yang lebih stabil dan inklusif.

Kematangan Demokrasi Pertanggung Ketahanan Nasional

Demokrasi, sebagai mandat dari sila keempat Pancasila, menegaskan pentingnya pemerintahan berbasis kerakyatan dan musyawarah mufakat. Implementasi demokrasi di Indonesia diharapkan dapat memperkuat sila ketiga, mengarah pada peradaban politik yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dengan prinsip keadilan yang diinginkan sesuai dengan Pancasila sila kelima.

Pemilu 2024 menjadi momentum krusial dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun, pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari berbagai kerawanan, baik dalam proses pemilihan itu sendiri maupun potensi luasnya pengaruhnya terhadap keamanan nasional. Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya proporsi pemilih muda. Penguatan pendidikan politik bagi kelompok pemuda menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa demokrasi nasional dapat tumbuh dan mencapai kematangan pada tahun 2029.

Tantangan dalam eskalasi politik Indonesia, khususnya di platform-platform digital, menjadi sorotan utama Gubernur Lemhannas RI dalam pernyataan akhir tahun 2022. Tiga tantangan terbesar yang diidentifikasi meliputi politik identitas, misinformation, dan hate speech (ujaran kebencian). Ketiganya menjadi poin kritis yang memerlukan perhatian dalam menjaga integritas proses demokrasi, terutama di tengah masa kampanye Pemilu.

Saat ini, Indonesia memasuki masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Momen ini menjadi panggung bagi tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh calon anggota legislatif untuk memaparkan visi dan misi mereka guna meraih dukungan konstituen politiknya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, dua aspek krusial perlu dilakukan. Pertama, diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih kuat terkait infrastruktur digital. Langkah ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, sehingga pemerintah mampu mengendalikan infrastruktur digital tanpa melanggar nilai-nilai demokratis.

Kedua, literasi digital menjadi hal mendasar yang perlu ditingkatkan. Literasi digital dianggap sebagai kunci utama bagi Indonesia dalam mengatasi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, penyebaran informasi yang keliru, dan penyebaran ujaran kebencian menuju pemilu 2024. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat dapat lebih bijak dan kritis dalam menyaring informasi, mengurangi risiko penyebaran misinformasi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.

Sementara itu, demokrasi, yang merupakan mandat dari sila keempat Pancasila, dapat membawa tantangan tersendiri jika implementasinya tidak sejalan dengan penguatan sila ketiga dan penguatan politik identitas. "Jadi diharapkan dengan melakukan demokrasi sebagai implementasi sila keempat yang menguatkan sila ketiga, kita akan berhasil meningkatkan peradaban politik yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Gubernur Lemhannas RI saat Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 Lemhannas RI pada Selasa, (09/08).

Dalam upaya mencegah tantangan terhadap demokrasi, Gubernur

Lemhannas RI menekankan beberapa aspek krusial yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya adalah sistem pemilu, budaya politik, dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu. "Pemilu akan kuat secara demokrasi prosedural. Yang paling penting, pemilu akan kuat dari segi demokrasi substantif," jelasnya.

Selain itu, diperlukan kampanye yang lebih terarah untuk meningkatkan partisipasi publik dan memperdalam dialog tentang program kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat pemilih. Di sisi lain, penguatan kebebasan sipil diharapkan dapat mendukung media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, dan akademisi dalam memenuhi hak politik sebagai warga negara.

Sementara itu, penguatan budaya politik juga menjadi fokus, dengan tujuan memperkuat budaya politik dalam pelaksanaan hubungan antara pusat dan daerah, fungsi legislasi, serta kepastian dan penegakan hukum. Semua langkah ini diharapkan dapat menciptakan pondasi yang kuat bagi demokrasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Upaya tersebut memerlukan peran aktif dari seluruh elit partai dan elit politik guna memperkuat kebebasan sipil dan budaya politik. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat yang memiliki hak politik sebagai warga negara juga menjadi kunci penting untuk menjamin konsolidasi demokrasi sesuai harapan.

Jika proses konsolidasi demokrasi pada pemilu 2024 berlangsung dengan baik, peluang matangnya demokrasi Indonesia pada pemilu 2029 menjadi sangat terbuka. Kematangan demokrasi ini dapat menjadi cerminan dari stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan yang kokoh untuk pembangunan nasional di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, menciptakan pondasi yang kuat bagi kemajuan dan keberlanjutan negara menuju Indonesia Emas 2045.

14 FEBRUARI 2024

AYO!!! SUKSESKAN PEMILU 2024



Menapaki Jejak Hubungan Indonesia - Palestina

Palestina merupakan negara pertama yang memberi dukungan kemerdekaan Indonesia tepatnya pada 4 September 1944, sedangkan Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina

Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011

Indonesia dan Palestina memiliki kerjasama di bidang pendidikan yang tertuang dalam MoU pada tanggal 22 Oktober 2007

Indonesia dan Palestina memiliki kerjasama kota kembar yaitu antara Jakarta dan Al-Quds Al-Shareef

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta yang membahas dukungan terhadap Palestina

"Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itoelah Bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel."

Soekarno - 1962





FOCUS GROUP DISCUSSION

Lemhannas RI Diskusikan Urgensi Evaluasi UU TNI

Foto. TNIAD.mil.id

“Ada sesuatu yang signifikan yang berubah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang “Evaluasi Undang-Undang TNI” pada Senin (2/10), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

Dalam FGD tersebut, yang didiskusikan tidak hanya tentang momentum UU TNI, tapi juga akan melihat secara komprehensif hubungan antara Pasal 30 UUD 1945, UU Pertahanan, UU TNI, UU Intelijen, UU Industri Pertahanan, UU PSDN, dan revisi yang ada di UU Ciptaker yang terkait dengan industri pertahanan. “Kami mencoba untuk melihat apa yang secara signifikan berubah dalam 20 tahun terakhir dan apa yang secara signifikan akan melompat dalam 20 tahun ke depan,” kata Andi Widjajanto.

Evaluasi ini dinilai dibutuhkan karena ketika UU TNI dirumuskan pada tahun 2004, kondisi Indonesia masih berada dalam awal-awal proses demokrasi. Tantangan yang dihadapi Indonesia 20 tahun silam jauh berbeda dengan

tantangan saat ini. Misalnya saat UU TNI dirumuskan pada tahun 2004, belum dikenal istilah-istilah seperti perang hibrida, grey zone operation, A2/AD, penguatan siber, indikasi yang kuat tentang pertarungan AS dan China, serta perpindahan ibu kota.

“Hal-hal seperti ini yang harus kita evaluasi sehingga nanti perubahan dinamika lingkungan strategis, perubahan ancaman, karakter teknologi, perang yang berbeda yang memang harus ditangkap, sehingga evaluasi UU TNI yang tahun depan berusia 20 tahun bisa secara tajam kita laporkan,” ucap Andi Widjajanto. Dirinya juga menyampaikan bahwa akan ada diskusi-diskusi lanjutan guna membahas bagaimana hasil evaluasi akan dilakukan.

Salah satu narasumber dalam FGD tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., M.Si. menyampaikan bahwa TNI saat ini mengalami kegamangan. Menurut Dr. H. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., M.Si., hal tersebut dikarenakan beberapa sebab. Pertama, karena peran TNI dituntut lebih meluas, tetapi regulasi, dan aturan

turunan UU TNI tidak lengkap sehingga berpotensi disalahkan atau melanggar hukum.

Kedua, TNI saat ini diminta/ditugaskan untuk terlibat dalam tugas/misi yang berada diluar ketentuan UU TNI. Penugasan tersebut diberikan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah UU TNI disahkan. Ketiga, persoalan tes kelayakan dan kepatutan Panglima TNI oleh DPR RI dinilai perlu turut dievaluasi karena nampak hanya bersifat formalitas semata dan seringkali dipolitisasi oleh politisi bahkan menarik TNI ke pusaran politik praktis.

Selain Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., M.Si., turut hadir Direktur G Bais TNI Laksma TNI Ibnu Anas S.H., M.Tr. Opsla.; Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., M.Si.; Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han).; Direktur SDM Ditjen Kuathan Kemhan RI Brigjen TNI Hendy Antariksa; dan Kepala Lab Indonesia 45 Iis Gindarsah, M.Si., M.Sc.

Sejumlah Prajurit TNI dan Personel ASN Lemhannas RI Menerima Kenaikan Pangkat



“Selamat kepada Prajurit TNI dan ASN yang telah dinaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi untuk periode 1 Oktober 2023,” kata Kepala Biro Umum Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Wibowo, M.H. Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Pelaporan Kenaikan Pangkat dan Golongan Periode 1 Oktober 2023 Personel TNI dan ASN Lemhannas RI pada Rabu (4/10) di Lobi Gedung Pancagatra Lantai 6, Lemhannas RI.

Sebanyak 16 prajurit TNI dan 25 ASN di lingkungan Lemhannas RI menerima kenaikan pangkat dan golongan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut didasari pada Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 185 Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lemhannas RI dan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor SPRIN/1747/IX/2023.

Lebih lanjut, Wibowo menyampaikan bahwa kenaikan pangkat tersebut merupakan kehormatan dan sebuah penghargaan. Kenaikan pangkat merupakan bagian dari pembinaan karir personel yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kesejahteraan moril, dan materil sehingga akan terpelihara tekad dan motivasi dalam bekerja. Namun, harus disadari bahwa bertambah tingginya pangkat yang disandang akan diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan tugas yang diemban.

“Kenaikan pangkat merupakan amanat yang sangat tinggi nilainya, memiliki dimensi moralitas yang mengandung pesan, dan harapan agar personel lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” kata Wibowo.

Ditegaskan Wibowo, kenaikan pangkat tersebut hendaknya dapat mendorong personel untuk bekerja lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat dan pegawai lainnya. “Diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang semakin baik lagi, memberikan manfaat bagi Lemhannas RI, terlebih bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN 24

PPSA 24 LEMHANNAS RI RESMI DITUTUP



“Hari ini saya melarang teman-teman untuk bermimpi menjadi pemimpin. Hari ini jadilah pemimpin,” seru Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat upacara penutupan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 24 pada Selasa (10/10), di Ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra Lantai 1, Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Andi Widjajanto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian/Lembaga, Mabes TNI, Mabes POLRI, Organisasi, dan Institusi yang telah memercayakan anggotanya untuk menempa pendidikan kepemimpinan strategis nasional di Lemhannas RI.

Andi Widjajanto berharap kepercayaan tersebut dapat dibuktikan dengan Alumni PPSA 24 menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam tugas-tugas berikutnya. Hal tersebut merupakan investasi yang negara berikan kepada 79 calon pemimpin nasional.

Andi Widjajanto berpesan agar Alumni PPSA 24 dapat membuktikan bahwa investasi yang sudah dilakukan oleh negara, kepercayaan dari Kementerian/Lembaga, Mabes TNI, Mabes POLRI, Organisasi, dan Institusi kepada Lemhannas RI bisa dibuktikan dengan kerja nyata dalam karir berikutnya.

Pada penyelenggaraan acara tersebut, diumumkan penetapan penerima penghargaan. Penghargaan Predikat Kertas

Karya Ilmiah Perseorangan Terbaik (TASKAP) dari setiap unsur (TNI, POLRI, dan ASN/Non ASN) diberikan kepada Brigjen TNI Rudy Saladin, M.A. dari TNI AD, Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla. dari TNI AL, Marsma TNI Bambang Juniar Djatmiko, S.Sos., M.M. dari TNI AU, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. dari POLRI dan Dr. Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han) dari ASN/Non ASN.

Penghargaan selanjutnya dengan kategori predikat akademik terbaik dari setiap unsur (TNI, POLRI, dan ASN/Non ASN) diberikan kepada Brigjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si. dari TNI AD, Laksda TNI Agus Hariadi, M.Han. dari TNI AL, Marsma TNI Mochammad Untung Suropati, S.E. dari TNI AU, Brigjen Pol Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. dari POLRI, dan Dr. Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han) dari ASN/Non ASN.

Selanjutnya, diberikan juga penghargaan Wibawa Seroja kepada Brigjen Pol Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. Penghargaan selanjutnya dengan kategori predikat akademik terbaik diberikan kepada Brigjen Pol Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. dan predikat taskap terbaik diberikan kepada Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si.

Perlu diketahui bersama, bahwa peserta pendidikan PPSA 24 yang telah lulus akan bergabung dan dilantik sebagai anggota IKAL-

Lemhannas. Andi Widjajanto menyampaikan agar para alumni PPSA 24 bisa terus menjaga kekeluargaan dan guyubnya untuk bisa menciptakan interaksi yang berkelanjutan.

Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL-Lemhannas masa bakti tahun 2023-2028 oleh Wakil Ketua Umum II DPP IKAL-Lemhannas Komjen Pol. (Purn) Drs. Togar M. Sianipar, M.Si.

Dalam sambutannya, Komjen Pol. (Purn) Drs. Togar menyampaikan alumni Lemhannas memiliki dua ciri, yakni berwawasan kebangsaan dan berwatak pejuang. Berwawasan kebangsaan, mengandung arti bahwa alumni Lemhannas RI hendaknya selalu berorientasi kepada kepentingan bangsa. Sedangkan berwatak pejuang mengandung arti bahwa alumni Lemhannas RI diharapkan selalu peduli kepada permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, memasuki tahun politik, Komjen Pol. (Purn) Drs. Togar berpesan kepada alumni PPSA 24 untuk mampu menjadi katalisator kerukunan dan keutuhan dengan jalan memengaruhi komunitasnya agar memelihara kehidupan yang rukun dan guyub.

Acara diakhiri dengan pemberian selamat oleh Andi Widjajanto beserta jajaran pejabat Lemhannas RI kepada masing-masing alumni PPSA 24.



TALK SHOW GEBYAR WAWASAN KEBANGSAAN

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SUMPAAH PEMUDA TAHUN 2023

DENGAN TEMA

"GENERASI MUDA SEBAGAI KEKUATAN DALAM MEMBANGUN BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS"

PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Gebyar Wawasan Kebangsaan

Jelang Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2023

Lemhannas RI kembali menyelenggarakan Talkshow Gebyar Wawasan Kebangsaan dengan mengangkat tema "Generasi Muda Sebagai Kekuatan Dalam Membangun Bangsa Menuju Indonesia Emas" dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda tahun 2023 pada Selasa (17/10), di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa, Jakarta Pusat.

Penyelenggaraan Talkshow Gebyar Wawasan Kebangsaan tersebut merupakan upaya Lemhannas RI untuk memaksimalkan potensi generasi muda sebagai kekuatan dalam membangun bangsa menuju Indonesia emas. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto sebagai pembicara kunci, menyampaikan ada hal yang paling mendasar dan harus masuk kedalam pikiran bangsa Indonesia, yakni mengapa bangsa Indonesia membutuhkan kebangsaan.

Andi Widjajanto menjelaskan perjalanan pemuda Indonesia sejak tahun 1928. Perjalanan pemuda Indonesia diawali dengan

membuka gerbang untuk membentuk kebangsaan Indonesia. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan dengan membuka gerbang merdeka yang penuh lika-liku. Namun, hal tersebut membuat bangsa Indonesia semakin kokoh karena sejak tahun 1945 sampai tahun 1968, gerbang merdeka tersebut bersanding dengan gerbang persatuan dan kesatuan.

Lebih lanjut penjelasannya, Andi Widjajanto menyebutkan pada masa orde baru Indonesia memasuki gerbang ketiganya, yakni gerbang pembangunan. Hingga saat ini, Indonesia memasuki gerbang demokrasi dan reformasi yang digagas pada tahun 1997 sampai 1998 lalu diperkuat sendi-sendinya sampai tahun 2004 dengan beberapa perangkat regulasi termasuk proses amandemen UUD 1945.

Gerbang demokrasi dan reformasi tersebut telah mengantarkan Indonesia ke titik di tahun 2023 ini yang akan diuji tahun depan pada pemilu 2024 dengan melakukan pemilu keenam berturut-turut secara demokratis

sejak tahun 1999. “Kami di Lemhannas melakukan kajian dan kemudian yakin, bahwa Indonesia membutuhkan tujuh kali pemilu demokratis berturut-turut untuk memantapkan demokrasi,” kata Andi Widjajanto.

Setelah tujuh kali pemilu demokratis berhasil dilakukan, maka gerbang baru akan terbuka untuk generasi muda Indonesia, yakni gerbang Indonesia maju. Gerbang baru tersebut adalah gerbang dimana Indonesia bisa melompat menjadi negara nomor empat dunia pada saat tahun 2045 dari nomor enam belas dunia saat ini. Saat itu terjadi, yang memegang kunci adalah generasi yang hari ini berusia 17 sampai 35 tahun.

“Jadi kembali ke pertanyaan mengapa kami di Lemhannas melakukan gebyar kebangsaan, (adalah) untuk memastikan pada saat teman-teman melangkah membuka gerbang Indonesia maju itu, kebangsaan yang dulu membuka pintu gerbang pertama kita untuk Indonesia tahun 1908, (lalu) 1928 tetap kelihatan alurnya,” tutur Andi Widjajanto.

Sejalan dengan hal tersebut, Andi Widjajanto berpesan kepada peserta yang hadir agar memperkuat tantangan-tantangan kedepan. Dirinya menyarankan kepada peserta yang hadir agar selalu memperkuat “mengapa” tiap akan melakukan sesuatu. Ketika “mengapa” diperkuat, maka “bagaimana” akan mudah didapatkan.

Mengakhiri sambutannya, Andi Widjajanto mengingatkan kepada peserta yang hadir

bahwa tujuan gebyar wawasan kebangsaan dilakukan agar saat generasi muda nanti membuka gerbang Indonesia emas, akan selalu mengingat itu semua diawali dengan adanya gerbang pembentukan bangsa Indonesia, gerbang merdeka, gerbang pembangunan, gerbang demokrasi, dan terus maju lebih cepat untuk membuka gerbang Indonesia emas 2045 yang menjadi hasil dari kerja keras generasi muda Indonesia.

Acara yang dikemas dalam bentuk talkshow tersebut dimoderatori oleh Yohana Elizabeth dan menghadirkan beberapa narasumber salah satunya adalah Dokter Peraih Satya Lencana Kebaktian Sosial dan Kick Andy Heroes dr. Yusuf Nugraha, M.H.

Berbicara tentang pemuda dengan sejarahnya, Dokter Yusuf memberikan pandangannya terhadap generasi muda saat ini. Dokter Yusuf menyampaikan bahwa peran pemuda tidak bisa diragukan lagi dalam situasi dan perubahan Indonesia. Hal tersebut sudah terlihat sejak tahun 1908, lalu berlanjut ke tahun 1928, kemudian tahun 1945 dengan andil para pemuda dalam memerdekakan Indonesia. “Jadi pemuda sudah tidak disangsikan lagi perannya dan ini adalah betul-betul hasil kerja pemuda,” ujarnya.

Untuk menyongsong Indonesia emas 2045, Dokter Yusuf mengajak untuk sering kebersamai dan membimbing para pemuda serta sharing pengalaman agar optimisme pemuda Indonesia menjadi nahkoda untuk

membawa Indonesia kedepan menjadi negara maju dapat terwujud.

Tentang nasionalisme, salah satu upaya yang Dokter Yusuf gerakkan adalah pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal pancasila. Dokter Yusuf meyakini bahwa dengan memunculkan jiwa nasionalisme, maka Indonesia akan menjadi negara maju.

Adapun beberapa narasumber lain yang hadir adalah Founder Yayasan Harapan Pemuda Indonesia Laila Nihayati serta Pekerja Seni dan Pegiat Literasi Yosi Mokaluu.



Berkolaborasi dengan PYC dan NUS

Lemhannas RI Gelar Program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Pertama Tahun 2023



Lemhannas RI menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD)-I tahun 2023 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah pada Sabtu (28/10), di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Maman Firmansyah menyampaikan bahwa tantangan yang kini dihadapi Indonesia semakin kompleks, baik di lingkup domestik maupun global. Hal tersebut ditandai dengan dampak dari peristiwa kekeringan akibat fenomena El Nino, pemanasan global jangka panjang dan perubahan iklim yang ekstrim.

Sementara itu pada sektor ekonomi, Indonesia menghadapi lemahnya daya saing pasar domestik terutama produk UMKM dan semangat hilirisasi sebagai salah satu program pemerintah. Dalam menyikapi semua tantangan tersebut, Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center dan National University of Singapore berkolaborasi melaksanakan kursus pemantapan pimpinan daerah.

Hal tersebut sejalan dengan misi Lemhannas RI untuk menyiapkan para pimpinan tingkat

nasional maupun daerah yang berpikir komprehensif dan berwawasan kebangsaan serta mempunyai cakrawala pandang yang universal. Selain meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, para peserta KPPD-I tersebut juga dirancang untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aspek kepemimpinan daerah, yang meliputi manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, komunikasi efektif, sampai dengan perumusan mitigasi berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan saling memotivasi satu sama lain dan membentuk jejaring kerja antar pemerintah daerah,” ujar Maman Firmansyah.

Dalam pengarahannya usai acara pembukaan, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A menyampaikan bahwa penyelenggaraan KPPD-I tersebut diikuti oleh 16 orang, yang terdiri dari 8 orang Bupati, 7 orang Walikota, dan 1 orang anggota DPRD. Dirinya berharap program KPPD-I dapat berjalan dengan lancar, sehingga proses belajar mengajar dapat



memenuhi kriteria penguatan kapasitas manajemen pemerintahan, juga memperkuat kepemimpinan nasional daerah yang berwawasan kebangsaan serta memiliki kemampuan manajemen publik yang handal.

Program KPPD-I dilaksanakan selama tiga minggu yang terbagi kedalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan per tanggal 26 Oktober sampai 28 Oktober yang dimulai dengan registrasi di hari pertama, tes psikotes di hari kedua, dan upacara pembukaan di hari ketiga. Tahap kedua program kursus dilaksanakan selama dua minggu dari tanggal 29 Oktober sampai 10 November di Singapura. Lalu tahap ketiga program kursus dilaksanakan selama satu minggu dari tanggal 13 November sampai 17 November yang dilanjutkan dengan penutupan di Lemhannas RI.

Walikota Bogor Dr. H. Bima Arya Sugiarto sebagai salah satu peserta menyampaikan bahwa kehadirannya bersama peserta lainnya dalam KPPD-I merupakan bentuk perintisan dari suatu program yang diharapkan jadi bagian skenario Indonesia emas 2045. "Kita bangga jadi bagian ikhtiar itu," kata Bima Arya.

Pada acara pembukaan KPPD-I tersebut, turut hadir Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda Citra Yusgiantoro, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D., dan Presiden Direktur PT. Bayan Resources, Tbk Dato' Dr. Low Tuck Kwong.

Selama seminggu kedepan, peserta KPPD-I melaksanakan pembelajaran di kelas, open ceremony yang dihadiri Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng, melaksanakan tur kampus NUS, berkunjung ke Singapore-ETH Zurich Center, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan Konservatorium Yong Siew Toh yang merupakan sekolah musik di National University of Singapore.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-78

“Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945 adalah semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah selaku inspektur upacara. Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-78 pada Senin (13/11), di Lapangan Tengah Lemhannas RI.

Tema “Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan” pada peringatan Hari Pahlawan ke-78 kali ini melalui perenungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata, yang dapat mengganggu bangsa Indonesia. Apalagi mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat beragam agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara,” kata Maman Firmansyah saat membacakan amanat Menteri Sosial RI Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T.

Ancaman dan tantangan tersebut pasti bisa ditaklukkan jika didukung semangat bangsa Indonesia seperti semangat yang dicontohkan para pejuang 10 November 1945. Semangat tersebut niscaya akan terus menyatukan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nilai-nilai perjuangan yang diajarkan para pahlawan bangsa niscaya dapat terus membawa jejak kemenangan bangsa Indonesia guna mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. “Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera,” pungkash Maman Firmansyah.

Dalam upacara tersebut turut dibacakan pesan-pesan sejumlah pahlawan, diantaranya pesan dari Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak Dien, Dr. Cipto Mangunkusumo, Jenderal Soedirman, Pattimura, I Gusti Ngurah Rai, dan Ir. Soekarno.



SEMINAR NASIONAL

Seminar Lanskap Strategis Asia Tenggara di Era Geopolitik 5.0



Lemhannas RI menyelenggarakan Seminar Nasional “Lanskap Strategis Asia Tenggara di Era Geopolitik 5.0” pada Rabu (15/11) di Flores Ballroom, Hotel Borobudur. Seminar ini merupakan rangkaian terakhir dari enam seminar yang diselenggarakan oleh Kedeputusan Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI pada tahun 2023.

Penyelenggaraan seminar nasional tersebut dilakukan dalam rangka mengelaborasi peran dan posisi Asia Tenggara dalam konteks global dan perspektif negara di era Geopolitik 5.0. “Saya berharap seminar ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dan komprehensif tentang peran dan posisi Asia Tenggara dalam Geopolitik 5.0,” kata Deputi Pengkajian Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni,

M.P. saat membacakan laporannya.

Seminar tersebut merupakan forum dialog dan diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan pengalaman, serta bertukar pandangan tentang isu-isu strategis di kawasan Asia Tenggara. “Asia Tenggara telah menjadi bagian dari kompetisi pengaruh negara adidaya sejak abad ke-15,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah.

Dewasa kini, Asia Tenggara turut berperan penting dalam era geopolitik 5.0 sebagai salah satu kawasan yang strategis dan penghubung rantai pasok global. Oleh karena itu, Lemhannas RI memandang penting untuk mendiskusikan kondisi geopolitik Asia Tenggara dengan membahas peran dan posisi Asia Tenggara dalam konteks

global serta mendiskusikan mengenai perspektif negara sahabat terhadap kawasan ini dalam geopolitik 5.0. “Saya berharap kita dapat berbagi pengetahuan dan pemikiran yang konstruktif tentang isu lanskap strategis Asia Tenggara dalam era geopolitik 5.0,” pungkas Maman Firmansyah.

Turut hadir dalam seminar tersebut, yakni Konselor Politik, Kedutaan Besar Amerika Serikat Mr. Kyle A. Richardson; Pakar Offset dan Pertahanan, Dosen Universitas Bina Nusantara Curie Maharani Savitri, Ph.D.; Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar India Mr. Basir Ahmed; Perwakilan Kementerian Perekonomian dan Pembangunan, Kedutaan Besar Jepang Mr. Ueda Hajime; dan Dosen Senior Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia Moch Faisal Karim, Ph.D.



Lemhannas RI Selenggarakan Sosialisasi Penyusunan LAKIP

Biro Perencanaan Settama Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Rabu (8/11), di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk membantu meningkatkan kinerja institusi pemerintah melalui penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, klasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan.

Menurut PermenPAN-RB Nomor 88 tahun 2021, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan komponen evaluasi SAKIP.

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan Lemhannas RI mendapatkan nilai kategori B. Kategori tersebut sudah masuk dalam kategori baik, namun perlu ada perubahan pada unit kerja. “Kita berharap bahwa kegiatan sosialisasi ini, tentunya Lemhannas ingin meningkatkan nilai dari LAKIP itu sendiri,” kata Kepala Biro Perencanaan Lemhannas RI Brigjen TNI Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han.

Pada acara sosialisasi tersebut, turut hadir para jajaran Lemhannas RI yang terkait dalam penyusunan LAKIP. Dani Wardhana berharap peserta mampu memahami dan meningkatkan penyusunan LAKIP agar kedepannya dapat tersusun dengan lebih berkualitas dan meningkat.

Dua narasumber yang hadir dalam sosialisasi tersebut, berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

(KemenPAN-RB), yakni Analis Kebijakan Ahli Muda Astri Mefayani dan Analis Kebijakan Ahli Muda Arif Tri Hariyanto.

“Dengan kita menggunakan SAKIP ini, kita mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” kata Astri Mefayani mengawali paparannya. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari yang penyelenggara negara hasilkan kepada publik dalam menggunakan uang negara.

Lebih lanjut, Astri Mefayani menyampaikan bahwa LAKIP digunakan untuk menceritakan capaian kinerja instansi pemerintah. LAKIP juga nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk continuous improvement. Hal tersebut untuk mempertanggungjawabkan hasil, baik achieve maupun tidak achieve yang harus disampaikan di laporan kinerja sebagai bahan perbaikan.

Dalam menyusun LAKIP, harus didasarkan dengan perjanjian kinerja (PK). PK merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Target



kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan PK memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, lalu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, kemudian sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, selanjutnya sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun pihak-pihak yang menyusun PK dari Kementerian/Lembaga adalah pimpinan tertinggi (Menteri/Pimpinan Lembaga), pimpinan unit kerja (eselon I), dan pimpinan satuan kerja. Pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang menyusun adalah pimpinan tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD). Selain K/L dan Pemda yang menyusun adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/ Walikota dapat memperluas praktik penyusunan PK sesuai kebijakan internal.

Selanjutnya, Arif Tri Hariyanto menyampaikan tentang pelaporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kemudian, Arif Tri Hariyanto menjelaskan format penyusunan laporan kinerja. Pada Bab I disajikan penjelasan

umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Lalu pada Bab II, diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Pada Bab III, berisi akuntabilitas kinerja yang menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Lalu selanjutnya adalah penutup yang mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis, serta strategi pemecahan masalah.

Mengakhiri paparannya, Arif Tri Hariyanto menekankan kepada peserta sosialisasi LAKIP bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan pengelolaan kinerja. Ditegaskan juga bahwa pengumpulan dan rangkuman tersebut harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan, dan media yang digunakan.



Lemhannas RI Diskusikan Posisi Indonesia di Tengah **Geo-Ekonomi AS**

Menyoroti perkembangan masa kini, Lemhannas RI melakukan kajian tentang “Strategi dan Kepentingan Geo-ekonomi AS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional” pada Kamis (26/10), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.



Dalam kegiatan yang bertajuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyebutkan bahwa diplomasi ekonomi kini menghadapi langsung kekuatan pasar, market forces. Hal ini tergambar dari perkembangan dunia yang saling menjalin hubungan diplomasi ekonomi, yakni proses formulasi dan tawar-menawar kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, serta investasi di negara lain.

Sejalan dengan hal tersebut, Amerika Serikat telah lama menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan strategi geo-ekonominya memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan perkembangan posisinya di tingkat global. Disisi lain, China juga memiliki

kekuatan ekonomi yang semakin berkembang. Terkait hal tersebut, terjadi peningkatan persaingan geopolitik dan geo-ekonomi antara China dan Amerika Serikat di Kawasan Laut China Selatan yang tentunya berpengaruh bagi Indonesia.

“Hal ini (persaingan antara China dan Amerika Serikat) menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya, serta mempertahankan posisi Indonesia di tengah transformasi energi dalam skala global,” ujar Reni Mayerni. Apalagi, menurutnya Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang dapat menjadi pertahanan ekonomi, baik nasional, maupun internasional.

Salah satu narasumber yaitu Peneliti CSIS Indonesia Dandy Rafitrandi, S.E., M.Sc. menyampaikan mengenai posisi dan strategi Indonesia. Disampaikan bahwa data IMF menggambarkan sebaran seberapa besar negara-negara akan terekspos dengan perubahan struktur rantai pasok. Kondisi Indonesia digambarkan menjadi negara yang relatif mengalami eksposur tinggi atas

perubahan tersebut dan memiliki kapasitas beradaptasi yang relatif rendah. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu hal yang harus dibenahi bersama.

“Sekarang international trades, investment, industry itu sudah merupakan pijakan yang sifatnya multipurpose. Tidak hanya melihat ekonomi, tapi juga melihat ketahanan dan pertahanan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia. Pertama mengevaluasi hubungan kerja sama Indonesia, baik dengan Amerika Serikat, maupun dengan Tiongkok. Kedua, Indonesia perlu berhati-hati dalam menentukan aliansi dan menjaga prinsip “Bebas-Aktif” Indonesia. Ketiga, Indonesia harus mewaspadai perubahan teknologi yang berlangsung cepat. Keempat, Indonesia perlu mengadaptasi kebijakan dalam negeri yang lebih banyak, seperti strategi hilirisasi dan TKDN.

Selain Peneliti CSIS Indonesia Dandy Rafitrandi, S.E., M.Sc., turut hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut, yakni Kepala Magister Kajian Intelijen STIN Dr. Mira Murniasara, S.S., LL.M. CTMP; Dosen Kajian Amerika Universitas Indonesia Dr. Muhammad Fuad; Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri Iwan Fredy Susanto. Sedangkan bertindak sebagai pembahas, yaitu Asisten Staf Khusus Presiden – Sekretariat Kabinet RI Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E. dan Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhannas RI Komjen Pol (Purn) Drs. Heru Winarko, S.H., M.H.

PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Sejumlah Jajaran PT Pertamina Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI

Perkembangan lingkungan strategis perlu menjadi perhatian bagi banyak pihak karena berdampak pada pemahaman dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Menyoroti hal tersebut, pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dinilai semakin dibutuhkan semua pihak, termasuk jajaran PT Pertamina. Oleh karena itu, sebanyak 78 jajaran PT Pertamina mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI selama 7 hari, dimulai Senin, 6 November 2023 sampai Minggu, 12 November 2023. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud nyata kerja sama antara Lemhannas RI dengan PT Pertamina Training & Consulting.

PT Pertamina diawaki oleh personel-personel yang memiliki beragam latar belakang, pengalaman, dan persepsi serta perbedaan kualitas pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Berkenaan dengan hal tersebut, kehadiran para personel PT Pertamina untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait ketahanan nasional, kepemimpinan, dan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, dapat melengkapi tata nilai yang diberlakukan PT Pertamina, yakni AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

“Kehadiran Bapak dan Ibu di Lemhannas RI merupakan salah satu upaya dan bentuk tanggung jawab moral dalam upaya mengatasi berbagai persoalan bangsa,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI

Laksdya TNI Maman Firmansyah saat menyampaikan sambutannya. Diharapkan setelah mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, para peserta dapat menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dengan senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Training & Consulting Muhammad Shabran Fauzani mengucapkan terima kasih kepada Lemhannas RI atas kolaborasi yang dijalin dalam pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pertamina Training & Consulting menyampaikan bahwa sebagai warga negara, merupakan hal yang mutlak untuk menjunjung tinggi nasionalisme dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang digagas atas kerja sama PT Pertamina Training & Consulting bersama dengan Lemhannas RI diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kecintaan, dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia melalui peran strategis kita sebagai individu profesional dan praktisi,” kata Direktur Utama PT Pertamina Training & Consulting.

Pelaksanaan Pelatihan Nilai-Nilai Kebangsaan dirancang untuk memberikan masukan kepada jajaran PT Pertamina dalam mentransformasikan nilai kebangsaan yang utuh dalam kehidupan sehari-hari. “Mari dengan semangat kita terus



tanamkan rasa cinta tanah air dan junjung tinggi nasionalisme dalam sanubari,” pungkas Direktur Utama Pertamina Training and Consulting.

Setelah membuka kegiatan, Plt. Gubernur Lemhannas RI memberikan pengantar pimpinan kepada seluruh peserta. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI mengajak seluruh peserta untuk memahami Indonesia. Untuk memahami Indonesia, diperlukan pengetahuan tentang perjalanan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, Plt. Gubernur Lemhannas RI menekankan jangan sampai



bangsa Indonesia melupakan sejarahnya.

Untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia memiliki kesepakatan bangsa yang diwujudkan dalam Empat Konsensus Dasar Bangsa. Namun, dewasa ini sering kali Empat Konsensus Dasar Bangsa harus dihadapkan pada perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman terkait Empat Konsensus Dasar Bangsa perlu diingatkan kembali.



“Tolong perhatikan masalah kesehatan, cermati, pahami supaya hidup sehat,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah saat menyampaikan sambutannya pada penyuluhan kesehatan yang kedua dalam rangka peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada Senin (6/11), di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI.

Penyuluhan kesehatan yang bertema “Hidup Sehat Dengan Intermittent Fasting, Pola Makan Baru, dan Olah Nafas,” turut dihadiri Pendiri Miracle of Breath Indonesia (MoBi) Bapak Eko Yudho Tamtomo dan mentor pendamping penyintas diabetes dan kanker Bapak Fredi Darmawan. Fredi Darmawan merupakan seorang penyintas diabetes

yang sudah sembuh berkat MoBi.

Penyakit kanker dan diabetes merupakan penyakit yang antara lain disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Kedua penyakit tersebut termasuk dari enam besar golongan penyakit yang mematikan di dunia.

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam hidup. Gaya hidup sehat, menjadi cara untuk mencegah terjangkitnya kedua penyakit mematikan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, intermittent fasting, pola makan baru dan olah nafas menjadi salah satu cara pengobatan mandiri untuk menuju kesembuhan dari sakit kanker dan

diabetes. “Untuk itu, seluruh anggota Lemhannas disimak betul masalah ini. Disimak (lalu) kemudian jangan sampai hanya sebatas disimak, (dan) dimengerti tetapi diaplikasikan,” ujar Maman Firmansyah.

Sebagai pemapar pertama, Fredi Darmawan mengawali dengan menyampaikan autophagy. Fredi menyampaikan bahwa menurut Dokter Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular dr. Royman Simanjuntak, Autophagy adalah proses alami tubuh untuk membuang sel-sel yang rusak dan tidak berfungsi, sekaligus menggantinya dengan sel-sel baru yang sehat. Mekanisme ini meningkatkan

kemampuan sel tubuh untuk melawan racun penyebab penyakit dan menjaga organ tubuh tetap berfungsi dengan baik.

Autophagy dapat dipicu melalui proses intermittent fasting. Proses tersebut membersihkan sel-sel yang rusak, termasuk sel kanker, dan menggantinya dengan sel-sel baru yang sehat. Proses ini mirip dengan menekan tombol reset tubuh manusia.

Regenerasi sel berkat autophagy juga dapat memberikan beragam manfaat bagi kesehatan, diantaranya menurunkan risiko terjadinya kanker dan diabetes, membantu meningkatkan fungsi otak dalam mengingat, memproses informasi dan mengambil keputusan, mencegah keparahan penyakit neurodegeneratif seperti alzheimer, membantu menurunkan berat badan, membantu pemulihan penyakit autoimun, membantu meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan proses pembentukan energi dan menyembuhkan GERD.

Pada proses intermittent fasting, dapat dilatih dengan melakukannya selama selama 12 jam. Misalnya, jika makan

terakhir pukul 08.00 malam, makan berikutnya akan dimulai pukul 08.00 pagi. Program tersebut dapat diperpanjang menjadi 13 jam hingga 16 jam, kemudian 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam, dan 120 jam.

Lebih lanjut, Eko Yudho Tamtomo sebagai narasumber kedua menyampaikan rahasia racun karbohidrat yang tidak disadari manusia. Karbohidrat bisa menjadi racun karena proses pencernaan dan metabolisme karbohidrat yang menghasilkan zat yang disebut glukosa. Glukosa adalah gula darah yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Jika kadar glukosa darah terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke.

Eko Yudho Tamtomo menyampaikan bahwa tubuh bisa menyembuhkan diri secara alami. Namun, harus menyinkronkan antara lifestyle dengan pola makan. Perlu di ketahui bersama bahwa sel kanker menyukai gula. Untuk menyelamatkan penderita kanker, penderita bisa makan makanan yang

mengandung protein dan lemak buatan yang mengalami proses penguraian rantai pendek, seperti butter (mentega), virgin coconut oil (minyak kelapa), dan virgin olive oil (minyak zaitun) yang nantinya oleh tubuh akan diubah menjadi sumber tenaga dengan nama keton, bukan glukosa.

“Saya merasa bahwa bapak-bapak, ibu-ibu dibutuhkan oleh keluarganya masing-masing. Ada istri yang menunggu, ada anak-anak yang mengharapkas belas kasih orang tuanya. Saya ingin bapak ibu umur panjang,” ungkap Eko Yudho Tamtomo.

Sejalan dengan harapannya tersebut, pelatihan yang diberikan bertujuan untuk mendoktrin cara berpikir personel Lemhannas RI agar mau melakukan pola makan yang benar. Dengan edukasi tersebut, rakyat Indonesia bisa berjalan dan menjadi negara yang kuat, memiliki rakyat yang kuat dan bisa hidup lebih lama serta memiliki harapan hidup yang lebih lama. Acara dilanjutkan dengan praktik olah nafas yang dipandu langsung oleh Eko Yudho Tamtomo.

Lemhannas RI Kembali Gelar Penyuluhan Kesehatan



PENGAJIAN STRATEGIK

FGD Tentang Adaptasi Teknologi dan Inovasi Guna Menghadapi Krisis Global



Melalui Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi, Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat judul “Ketahanan Sosial Budaya dalam Adaptasi Teknologi dan Inovasi guna Menghadapi Krisis Global” pada Kamis (16/11) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 5, Lemhannas RI.

“Ketahanan sosial budaya itu tentunya mengacu kepada kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan, krisis, atau perubahan sosial dan budaya,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya

TNI Maman Firmansyah mengawali sambutannya.

Konsep yang dibahas menyoroti pentingnya memahami dan memperkuat faktor-faktor sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap berbagai tantangan. Konsep ketahanan sosial dan budaya digunakan dalam berbagai situasi, seperti menghadapi bencana dunia atau mengatasi perubahan besar pada lingkungan.

Ketidakpastian global yang mengarah kepada krisis global mempunyai dampak yang signifikan di berbagai bidang, baik sosial maupun ekonomi, seperti harga

energi dan inflasi yang meningkat di tahun 2023 sehingga berdampak besar pada anggaran rumah tangga dan belanja masyarakat.

Sejalan dengan tantangan tersebut, respon kebijakan strategis dan pelibatan banyak negara melalui kerja sama global perlu dilakukan. Maman Firmansyah menyampaikan perlunya peran dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi krisis global dan pengaruh negatif perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kerja sama antara semua pihak dapat menjadi kunci untuk membangun ketahanan sosial budaya yang solid di era adaptasi teknologi dan inovasi.



FGD yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si., salah satu narasumber yang hadir Analisis Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M. menyampaikan tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui gerakan Indonesia bersatu sebagai ketahanan sosial budaya dalam adaptasi teknologi dan inovasi guna hadapi krisis global.

Tentang gerakan nasional revolusi mental, terdapat lima program gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat sebagai strategi implementasi yang

dilengkapi dengan value attack. Pertama adalah “Gerakan Indonesia Melayani” untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kedua adalah “Gerakan Indonesia Bersih” untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Ketiga adalah “Gerakan Indonesia Tertib” untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik

mengacu kepada asas ketertiban umum. Keempat adalah “Gerakan Indonesia Mandiri” untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi, dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global. Lalu yang kelima adalah “Gerakan Indonesia Bersatu” untuk mewujudkan perilaku saling menghargai, dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Nuswardana Sarodja juga menyampaikan beberapa kontribusi strategis revolusi mental dalam upaya pembangunan karakter, ketahanan sosial budaya dalam adaptasi teknologi, dan inovasi yang dilakukan gerakan nasional revolusi mental, yakni melakukan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern, sejahtera, berkarakter, demokratis, lalu pada sistem sosial melakukan upaya pembangunan generasi berkualitas, keluarga dan masyarakat berkarakter pancasilais melalui pendidikan keluarga dan masyarakat.

Kontribusi lainnya diantaranya adalah aksi nyata “Gerakan Indonesia Bersatu: pada simpul-simpul pusat perubahan di daerah dan masyarakat untuk memperkokoh toleransi, kerukunan dalam kebhinnekaan, saling pengertian, dan memperkuat persatuan bangsa serta penguatan pendekatan multikulturalisme dan nilai-nilai pancasila untuk menciptakan harmoni dan kerukunan umat beragama guna membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

FGD tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber lain, yaitu SVP Dentsu Corporate Bapak Janoe Arijanto, Direktur Eksekutif Pusat Analisis Jaringan Sosial Dr. Rendy Ananta Prasetya, S.Sos., M.H., CEO PT. EBDesk Indonesia Bapak Ridwan Prasetyarto, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Bapak Syarifuddin, M.Si dan Education For Sustainable Development Specialist Ibu Aulija Esti Widjiasih.

Plt. Gubernur Lemhannas RI
Bertindak Sebagai Pembicara
Kunci pada Webinar Nasional

IKABNAS



Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah menjadi pembicara kunci pada kegiatan Webinar Nasional yang digagas oleh Ikatan Keluarga Alumni Kebangsaan Lemhannas (IKABNAS) dengan tema “Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Kejayaan Indonesia Emas” pada Rabu (22/11), secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Maman Firmansyah menghaturkan rasa terima kasihnya pada Alumni Kebangsaan Lemhannas RI atas webinar nasional yang diselenggarakan. Dirinya berharap kegiatan webinar tersebut dapat memberikan inspirasi bagi para Alumni Kebangsaan Lemhannas RI dan para pemuda, baik pelajar maupun mahasiswa agar terus bermimpi dan berkarya untuk Indonesia.

“Pemuda merupakan sumber daya manusia utama dalam pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, dan agen perubahan sosial,” kata Maman Firmansyah.

Maman Firmansyah mengatakan bahwa pemuda juga merupakan salah satu kekuatan dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dari segala aspek. Selain itu, ia juga menyampaikan perjuangan bangsa Indonesia yang melibatkan peran penting pemuda.

Peran penting pemuda dalam sejarah bangsa Indonesia sudah dimulai sejak

pergerakan Budi Utomo tahun 1908, lalu sumpah pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966 sampai pergerakan mahasiswa tahun 1998. Hal tersebut telah membuktikan bahwa peran pemuda mampu memengaruhi proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Kemudian, Maman Firmansyah menyebut bahwa pemuda merupakan generasi yang kreatif, tak kenal batas, dan gigih dalam mengejar tujuannya. Kecepatan dalam menggunakan teknologi internet juga menjadi karakteristik pemuda.

Hal tersebut merupakan ciri-ciri globalisasi yang menciptakan suatu perubahan kemajuan, perkembangan teknologi dan produksi ekonomi yang saling bergantung sehingga meningkatkan masalah bersama serta adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya.

Sejalan dengan hal tersebut, para pemuda dituntut harus selalu meningkatkan keterampilan dan keahliannya melalui pendidikan dan soft skill agar tidak tertinggal. Maman Firmansyah melihat bahwa urgensi peran pemuda semakin dibutuhkan mengingat Indonesia saat ini tengah bersiap untuk memasuki bonus demografi. Maman Firmansyah melihat hal tersebut menjadi modal bagi negara dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan nasional karena jumlah penduduk usia

produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Untuk itu, bonus demografi harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak agar dapat terwujud tatanan hidup baru yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang gemilang, pengembangan pemuda menjadi pemimpin masa depan dan aktor utama dalam kemajuan negara harus difokuskan. Para pemuda harus diberikan pendidikan, pelatihan, dan pembekalan nilai-nilai yang kuat agar memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Maman Firmansyah menegaskan, jika seluruh komponen bangsa sama-sama berkomitmen, maka Indonesia emas bukanlah sekedar impian belaka. “Mari kita bersatu, membangun jaringan, mendukung satu sama lain dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bangga dengan prestasi dan potensi generasi muda yang gemilang,” pungkasnya.

Turut hadir Ketua Umum IKABNAS Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H. dan beberapa narasumber dalam webinar tersebut, yakni Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin, Sekretaris IKABNAS M. Abdul Basit, Influencer Aryo Seno Bagaskoro, dan Founder Yayasan Harapan Pemuda Indonesia Laila Nihayati.

ACARA PUNCAK

Peringatan HUT KE-52 KORPRI
Di Lemhannas RI

PElepasan Purna Tugas

Pembinaan Tumpang

Penyediaan Hadiah Lomba & Bimbingan

Jakarta, 04 Desember 2023



HUT KORPRI KE-52

HUT KORPRI Ke-52, Plt. Gubernur Lemhannas RI: Jaga Netralitas Pemilu 2024

Lemhannas RI menyelenggarakan acara puncak HUT KORPRI yang Ke-52 bertempat di Ruang Dwi Warna pada Senin (4/12). Acara tersebut diselenggarakan setelah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama satu bulan dalam menyambut HUT KORPRI Ke-52.

Terdapat serangkaian kegiatan dalam menyambut HUT KORPRI ke-52 tersebut, yakni penyuluhan kesehatan, pelatihan public speaking dan master of ceremony, pelatihan investasi saham, pelatihan master of excel, beragam lomba mulai dari tenis meja, bola voli, bulu tangkis, Line Dance, Lemhannas Idol, dan Lemhannas Master Chef. Serangkaian kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel Lemhannas RI, termasuk TNI dan POLRI.

Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Laboratorium Lemhannas RI Redina Sirait, S.S., M.M. selaku Ketua Rangkaian Acara Puncak HUT KORPRI ke-52 dalam laporannya pada acara puncak HUT KORPRI. "Harapannya, semoga ke depan sinergitas dan kekompakan terjalin semakin erat," ujar Redina Sirait saat menyampaikan laporan pada acara tersebut.

Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksda TNI Maman Firmansyah dalam sambutannya berharap agar KORPRI Lemhannas RI bisa semakin sukses, maju dan menjunjung tinggi Panca Prasetya KORPRI. Tak lupa Maman Firmansyah turut menyampaikan



apresiasinya atas kerja keras seluruh panitia dalam penyelenggaraan acara tersebut.

HUT KORPRI Ke-52 tahun ini dirayakan menjelang berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. “Sehingga perlu diperhatikan seluruh anggota, khususnya KORPRI Lemhannas RI untuk bertindak dan bersikap netral,” tegas Maman Firmansyah.

Maman Firmansyah menegaskan, jika pemilu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dengan menjaga netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI, dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Lebih lanjut, Maman Firmansyah menyerukan kepada personel Lemhannas RI untuk bisa turut menginfokan kepada masyarakat atau warga di daerahnya masing masing agar mereka dapat bersikap netral bagi mereka yang harus bersikap netral.

HUT KORPRI tahun 2023 mengusung tema “KORPRIKAN INDONESIA”. Dengan tema tersebut, Maman Firmansyah berharap anggota KORPRI Lemhannas RI lebih semangat dalam bekerja

dan berkontribusi melayani kepentingan publik serta selalu berupaya meneguhkan fungsinya sebagai perekat pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan profesionalisme terhadap kepentingan bangsa negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Maman Firmansyah menyampaikan beberapa pesan kepada personel Lemhannas RI. Pertama, Maman Firmansyah berpesan agar solidaritas KORPRI dan kerja sama selalu diperkuat dengan memegang teguh core value ASN “BERAKHLAK”. Kemudian, Maman Firmansyah berpesan untuk melakukan terobosan inovasi dan berkelanjutan, mengubah mindset, cara pikir dan cara bekerja, menerapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan, menciptakan generasi yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Usai menyampaikan sambutannya, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan pelepasan purnabakti sejumlah 17 orang oleh Maman Firmansyah. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan pengumuman pemenang lomba dan penyerahan hadiah, penarikan doorprize dan grandprize serta penampilan juara lomba Line Dance dan Lemhannas Idol.



Diplomasi pertahanan memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Hal ini melibatkan penggunaan saluran diplomatik dan kerja sama militer untuk mengatasi konflik dan meningkatkan saling pengertian antar negara. Esai ini akan mengeksplorasi pentingnya diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Meski letak geografis Indonesia terjauh, komitmen negara dalam menjaga perdamaian internasional memungkinkan Indonesia berkontribusi positif dalam menyelesaikan konflik global.

Perang Rusia-Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia (bersama dengan pasukan separatistis pro-Rusia) dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari 2014 setelah Revolusi Martabat Ukraina, dan awalnya berfokus pada status Krimea dan bagian dari Donbas, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Delapan tahun pertama konflik termasuk aneksasi Krimea oleh Rusia (2014) dan perang di Donbas (2014–sekarang) antara Ukraina dan separatistis yang didukung Rusia, serta insiden angkatan laut, perang siber, dan ketegangan politik. Menyusul pembangunan militer Rusia di perbatasan Rusia-Ukraina dari akhir 2021, konflik meluas secara signifikan ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung hingga kini mengakibatkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Hal ini dimulai ketika Rusia mencaplok Crimea, wilayah yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Ukraina, diikuti oleh gerakan separatistis pro-Rusia di Ukraina timur. Konflik ini telah menyebabkan ribuan kematian,

pengungsian warga sipil tak berdosa, dan ketegangan hubungan internasional. Dalam update PBB bulan September, perang Rusia di Ukraina mengakibatkan kematian sedikitnya 8.800 warga sipil sejak Februari 2022. Sebanyak lebih dari 14.900 orang terluka. Total korban dari warga sipil akibat perang yang berkecamuk tercatat sekitar 23.800 orang. Namun data di lapangan kemungkinan lebih tinggi.

Sifat Formal Diplomasi Indonesia

Indonesia jelas tidak mendukung aksi perang dimanapun berada, sebagai negara cinta damai Indonesia lebih memilih jalur diplomasi daripada perang. Diplomasi Indonesia dikenal dengan pendekatan formal dan profesionalnya. Para diplomat mematuhi protokol yang ketat, memastikan komunikasi dan negosiasi yang efektif. Formalitas ini memungkinkan Indonesia membangun kredibilitas dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik, yang mana hal ini sangat penting dalam memediasi konflik. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, diplomasi formal Indonesia dapat berkontribusi dalam membina dialog antara Rusia dan Ukraina.

Indonesia telah lama menerapkan kebijakan non-interferensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Asas ini dikenal dengan doktrin “Pancasila” yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Meskipun non-interferensi memastikan Indonesia tidak memihak dalam konflik Rusia-Ukraina, hal ini juga memfasilitasi upaya mediasi yang tidak memihak, karena kedua belah pihak yakin bahwa peran Indonesia akan netral dan adil.

Implementasi dari menerapkan kebijakan

non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain tersebut kemudian Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mewakili Republik Indonesia, menyampaikan proposal perdamaian. Pidatonya pada Dialog Shangri-La International Institute for Strategic Studies (IISS) ke-20, forum pertahanan dan keamanan tahunan Asia di Singapura memberikan solusi perdamaian untuk Ukraina dan Rusia, meskipun mendapat penolakan, penerimaan dan kritikan.

Seperti dua sisi keping perak, dimana Ukraina menolak, di sisi lain Rusia memberi lampu hijau. Di pihak Ukraina, terdapat reaksi, terutama terkait referendum. “Sepertinya rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov. Kami tidak membutuhkan mediator untuk datang dan menyampaikan rencana aneh ini kepada kami. Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Rusia saat ini berusaha mencegah serangan balik Ukraina”.

Di pihak Rusia, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko menyatakan pihaknya siap menerima setiap usulan perdamaian yang diajukan. Ia mengaku belum mendapat tawaran resmi namun sudah mendengarnya di media. “Kami menyambut baik upaya semua negara untuk menyelesaikan konflik ini secara damai,” kata seorang diplomat senior Rusia kepada kantor berita resmi Moskow.

Di sisi lain, usulan Menhan itu menuai pertanyaan tajam dari sejumlah tamu asing yang hadir langsung di KTT Keamanan Asia Dialog IISS Shangri-La ke-20. Setidaknya ada dua atau lebih tiga tamu asing yang

Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menyelesaikan



meminta penjelasan kepada Menhan saat dirinya sedang berada di podium. Menhan menjawab beberapa pertanyaan dengan tegas dan tidak menyebutkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam usulannya.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menyampaikan bahwa negara-negara Asia lebih berpengalaman dalam konflik perang. Bahkan, hal ini bisa lebih buruk dan menakutkan dibandingkan apa yang dialami Ukraina. Ia lanjutkan lagi: "Tanyakan pada teman kita di Vietnam, tanyakan pada teman kita di Kamboja. Tanyakan pada mereka berapa kali mereka diserbu, tanyakan pada teman kita di Vietnam. Lihat berapa kali mereka diserbu. "Tanyakan kepada Indonesia

sudah berapa kali kami diinvasi. Kami tahu tentang perang tersebut sehingga kami ingin membantu mengakhirinya dan kami ingin membantu mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Tapi sekali lagi, masyarakat berhak menentukan".

Solusi Damai

Pada kesempatan yang baik tersebut Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam konteks diplomasi pertahanan memberi lima solusi damai terhadap perang Rusia dan Ukraina. Pertama, mengusulkan gencatan senjata. Kedua, meminta mundurnya masing-masing negara yang bertikai 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, meminta keterlibatan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara. Keempat, mengusulkan pasukan pemantau dan PBB itu terdiri dari kontingen negara-negara yang disepakati. Kelima, meminta PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 semakin meningkatkan potensinya dalam berkontribusi menyelesaikan perang Rusia-Ukraina. Sebagai anggota tidak tetap, Indonesia aktif terlibat dalam pertemuan dan diskusi DK PBB, menyediakan wadah untuk menyuarakan keprihatinan dan mengusulkan solusi terhadap berbagai permasalahan global, termasuk konflik Rusia-Ukraina. Dalam forum ini, Indonesia dapat melobi perundingan damai dan

mengadvokasi bantuan kemanusiaan untuk disalurkan ke daerah yang terkena dampak.

Diplomasi pertahanan Indonesia lebih dari sekedar negosiasi formal dan lobi politik. Negara ini memiliki sejarah dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang membutuhkan, meskipun negara tersebut jauh dari Asia Tenggara. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, Indonesia dapat berkontribusi dengan memberikan bantuan, seperti obat-obatan dan makanan, kepada warga sipil yang terkena dampak. Bantuan ini tidak hanya membantu meringankan penderitaan yang ada, namun juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mendukung upaya pembangunan perdamaian.

Diplomasi pertahanan Indonesia dapat berperan penting dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina. Melalui sifatnya yang formal dan tidak campur tangan, Indonesia dapat mendorong dialog, menengahi konflik, dan mengadvokasi negosiasi damai. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia mempunyai platform untuk menyuarakan keprihatinan dan mengusulkan solusi seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo dalam proposal perdamaannya. Selain itu, tradisi pemberian bantuan kemanusiaan berkontribusi pada upaya bantuan langsung dan pembangunan perdamaian jangka panjang. Di dunia yang dilanda konflik, komitmen Indonesia terhadap perdamaian global melalui diplomasi pertahanan patut dihargai dan patut diakui.

Perang Rusia-Ukraina

Laksda TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr.(Han)., CHRMP

Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Politik Lemhannas RI

Implementasi Nilai Keharmonisan & Gotong Royong Guna Menyediakan Energi untuk Seluruh Negeri sesuai dengan Core Value AKHLAK

Wisnu Wardhana, dkk*

Alumni Pemanjapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pertamina Group Angkatan II Kolaborasi Lemhannas RI & PT. Pertamina Training and Consulting Tahun 2023

Indonesia merupakan negara berkembang yang di setiap sektornya mulai mengalami peningkatan yang pesat. Seiring dengan pembangunan setiap sektor tersebut, kebutuhan masyarakat Indonesia akan energi dasar telah menjadi kebutuhan primer di era milenial ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan banyak suku bangsa mempunyai tantangan untuk bisa memberikan sumber energi yang berkelanjutan dalam hubungannya dengan keterpencilan serta kurangnya konektivitas antar kepulauan. Pertamina diharapkan untuk bisa memberikan keadilan energi berdasarkan prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, and sustainability.

Pertamina adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan

penyumbang dividen terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi, mulai dari Eksplorasi dan Produksi, Pengolahan, Distribusi dan Pemasaran, yang berdasarkan tata nilai AKHLAK sebagai core values.

AKHLAK bagi Pertamina adalah sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja Pertamina dan entitas anaknya secara berkelanjutan dimana sejalan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika dengan core values Toleransi, Keharmonisan dan Gotong Royong.

Dalam mengimplementasikan core values AKHLAK yang beriringan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, Pertamina telah membuat beberapa terobosan melalui sejumlah inisiatif unggulan yang meliputi BBM Satu Harga dan Pertashop; Desa

Energi Berdikari; dan Keberagaman Perwira Pertamina.

BBM Satu Harga dan Pertashop

PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN mempunyai mandat dan tanggung jawab untuk menyediakan BBM dan LPG ke seluruh pelosok negeri, baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk di wilayah 3T (Terdepan Tertinggal Terluar). Kontribusi dan komitmen tersebut dibuktikan Pertamina melalui dua program unggulan yakni Pertashop dan BBM Satu harga.

Pertashop merupakan Lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non subsidi, Elpiji Non Subsidi, Pelumas, dan produk pertamina lainnya yang belum terlayani oleh Lembaga penyalur Pertamina



Foto. kpi.pertamina.com



dengan sasaran seluruh desa di Indonesia tersedia minimal satu outlet BBM dan LPG.

Selain Pertashop, melalui BBM Satu Harga, Pertamina juga mengalirkan energi hingga ke wilayah terujung Indonesia atau yang biasa dikenal dengan wilayah 3T. Melalui BBM Satu Harga, Pertamina membangun Lembaga Penyalur resmi di wilayah terpencil dengan menyediakan premium dan solar sesuai harga yang diatur oleh Pemerintah atau sama dengan yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah lain di Indonesia. Dengan program ini, selain pemerataan energi juga tercapai keadilan energi.

Desa Energi Berdikari (DEB)

Desa Energi Berdikari (DEB) dirancang Pertamina untuk melaksanakan komitmen Pertamina terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal sehingga tercipta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Program DEB Pertamina telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Sejak saat itu, program Desa Energi Berdikari telah menghasilkan manfaat 170.880 wp energi Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 605.000 m³/tahun energi biogas dan gas metana, 8.000 watt energi microhydro, 6.500 liter energi biodiesel per tahun, serta 16.500 wp energi hibrida Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Angin.

Sampai dengan September 2023 terdapat 58 DEB yang sudah dibangun Pertamina,

dimana baru saja diresmikan 6 DEB dengan konsep mengalirkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bekerja sama dengan Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) yang merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak dalam energi baru terbarukan.

Keberagaman Perwira Pertamina

Pertamina memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas serta putra daerah untuk bergabung di perusahaan. Melalui Program Perekrutan Bersama (PPB) yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, Pertamina dan Anak Perusahaan pada tahun 2019 - 2020 mempekerjakan 60 orang penyandang disabilitas, 30 orang putra daerah Papua, serta melaksanakan 3 batch Program Rekrutasi Putra Daerah Kalimantan, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mendukung sejumlah proyek dan aktivitas operasional Pertamina. Pertamina juga mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Dua dari enam Dewan Direksi adalah perempuan dan lebih dari 17% dari tingkat manajemen senior adalah pemimpin perempuan.

Implementasi Nilai Keharmonisan dan Gotong Royong dalam Penyediaan Energi

Pertamina sebagai pilar perekonomian Indonesia di bidang energi tidak hanya sebatas mengejar keuntungan bisnis, namun juga berorientasi pada

pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Sebagai perusahaan energi nasional yang terus mendorong program transisi energi yang saat ini telah menjadi isu global, Pertamina memiliki peranan penting dalam aspek pengembangan energi hijau dan pengurangan emisi. Tentunya upaya Pertamina tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, dibutuhkan kerjasama dengan para stakeholder dan Masyarakat

Implementasi nilai keharmonisan & gotong royong untuk penyediaan energi yang dilakukan oleh Pertamina diantaranya adalah menuntaskan pembangunan Lembaga Penyalur BBM 1 Harga di 278 titik yang tersebar di wilayah 3T di seluruh Indonesia. Selain dampak energi, Program DEB juga memberikan dampak terhadap perekonomian kepada 3.201 Kepala Keluarga dengan total multiplier effect sebesar manfaat 1.8 miliar/tahun. Tak lupa, dampak pengurangan emisi karbon sebesar 565.928 tonCo₂eq/tahun, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Putra-Putri terbaik Indonesia dari seluruh suku bangsa untuk bisa membangun negeri Bersama Pertamina.

**Tim Penulis: Wisnu Wardhana, Devi Desianti Pritasari, Agung Prasetya Permadi, Aldiansyah Idham, Ariadi, Brilian Pradana, Dharma Satriadi, Dwi Muhammad Abdu, I Ketut Laba, Kurnia Pinayungan, Norman Ginting, R. Adriyono, Rachmat Hidayat, Whisnu Bahriansyah, Alline Rosida Djumhana, Vinda Syakiya Lubis*



Pemanfaatan Pesawat Udara Tak Berawak (UAV) Ketinggian Tinggi, Daya Tahan Lama (Hale/ High Altitude Long Endurance) untuk Kepentingan Nasional

Marsda TNI Yulianta, S.I.P., M. Tr (Han)

Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ilpengtek Lemhannas RI

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ilpengtek) bidang kedirgantaraan khususnya pesawat udara tak berawak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sangat pesat dan sangat cocok untuk melaksanakan misi pengawasan, pengintaian, penargetan untuk kepentingan Nasional baik untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan ekonomi, serta kepentingan lain.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari 17.500 pulau dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote dimana luas wilayah lautan 2/3 dan daratan hanya 1/3, hal ini mengandung banyak kerawanan dan ancaman terhadap kepentingan nasional kita sehingga pengawasan dari udara sangat penting untuk dilaksanakan secara terus menerus.

Pada umumnya pengawasan dan monitoring wilayah melalui udara

dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit, namun sampai dengan saat ini teknologi satelit oleh Negara berkembang masih dirasakan sangat mahal baik pembuatan, peluncuran dan operasionalnya serta sampah satelit yang ada di angkasa dapat meninggalkan banyak masalah.

High Altitude Long Endurance (HALE) pesawat tanpa awak dengan jangkauan tak terbatas dapat menjadi solusi pengganti satelit dimana HALE dapat membawa peralatan seperti pada satelit dan beroperasi di Stratosfir atau dengan ketinggian 70.000 Feet.

Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) HALE

Pengembangan teknologi pesawat HALE sampai dengan saat ini terus menerus dilakukan oleh berbagai Negara antara lain USA, China, Turkiye, Indonesia maupun negara lain untuk mendapatkan

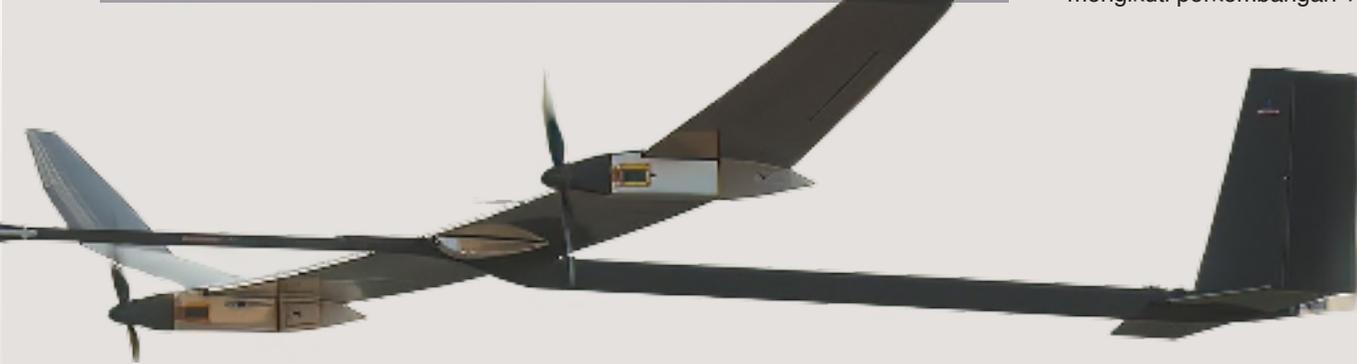
hasil yang terbaik dan maksimal dari segi lama terbang, daya muat maupun pengontrolan pada saat peluncuran, misi serta pendaratan untuk dilaksanakan perbaikan-perbaikan.

Salah satu contoh Teknologi HALE yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah Pesawat PHASA-35, Phasa-35 UAV listrik tenaga surya akan menggunakan teknologi baterai yang telah terbukti di industri, yang akan menjamin ketahanan penerbangan satu tahun sebelum pemeliharaan. Desain ultra ringan dan struktur efisien akan memungkinkan PHASA-35 terbang pada ketinggian maksimum 70,000 kaki (21,336m). Kontrol penerbangan yang mulus akan dilengkapi dengan desain ekor, yang mengintegrasikan kemudi dengan roll dihedral atau yaw sehingga pesawat dikontrol dengan mudah dan aman baik pada saat peluncuran, misi dan kembali mendarat. Pesawat ini akan memiliki



berupa membayangi, pengusiran, penangkapan atau penghancuran terhadap pelanggar atau pengganggu wilayah kedaulatan NKRI.

Semua misi yang dilaksanakan oleh HALE untuk mendapatkan hasil yang baik serta sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan nasional tidak bisa lepas dari perangkat elektronik baik audio video yang sangat canggih yang disesuaikan dengan misi yang diemban dan dikontrol oleh pusat pengendali di darat yang harus diawasi oleh personel yang handal dan peralatan yang canggih dan selalu mengikuti perkembangan Teknologi.



PHASA-35 adalah kendaraan udara tak berawak (UAV) ketinggian tinggi, daya tahan lama (HALE) baru yang dikembangkan oleh BAE Systems bekerja sama dengan Prismatic. Sumber foto: baesystems.com

kemampuan komunikasi beyond line-of-site (BLOS). Ini akan membawa sistem komunikasi komando dan telemetry Iridium SBS BLOS dan generator arus searah (DC) kontinu dengan kapasitas mulai dari 300W hingga 1.000W.

Pesawat HALE dimaksudkan untuk melakukan misi jangka panjang dengan biaya operasional rendah. Ini juga dapat digunakan untuk operasi musim panas kutub dan dikonfigurasi untuk melakukan operasi sepanjang tahun pada garis lintang 35°.

Misi yang dapat dilaksanakan oleh HALE dengan bantuan Radar untuk Kepentingan Nasional baik di bidang Pertahanan, Keamanan, Ekonomi dan sebagainya antara lain:

Pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan para pengambil keputusan,

pada tingkat strategis, keputusan-keputusan ini merupakan hasil perpaduan berbagai sumber informasi, salah satunya adalah radar. Informasi ini harus disebarluaskan ke seluruh tingkat pengambil keputusan dan merupakan masukan bagi sistem Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR). Dalam Pertahanan Udara, pengawasan dilakukan oleh sistem Peringatan Dini Lintas Udara (AEW), yang bertugas mendeteksi segala ancaman di udara.

Pengintaian. Pengintaian bertujuan untuk mendapatkan data data pihak pelanggar atau pengganggu secara terus menerus untuk mendapatkan titik lemah atau kerawannya.

Penargetan. Penargetan merupakan tindak lanjut dari pengawasan dan pengintaian untuk dilaksanakan tindakan

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sumber daya alam yang sangat kaya memerlukan penggunaan HALE untuk melakukan misi pengawasan, pengintaian dan penargetan terhadap semua ancaman dan pelanggaran hukum dan wilayah NKRI. Pesawat HALE yang diperlukan sebanyak 6 pesawat yang masing masing daerah waktu WIB, WITA dan WIT dialokasikan 2 pesawat dengan operasi 1 pesawat dan 1 pesawat sebagai pesawat cadangan sehingga misi dapat dilaksanakan tanpa jeda secara terus menerus dan Kepentingan Nasional dapat selalu dijaga dengan baik.



KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. R. Z.

PANCA

PUTRA SIMANJUNTAK

*Selalu Bekerja dengan Sungguh-sungguh dan
Selesaikan Tugas Tanpa Menunda*



Komjen Pol. Drs. Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, M.Si. lahir di Balige, Kab Toba, Sumatera, 19 Januari 1969. Meski memiliki darah dan terlahir di Tanah Batak, sosok jenderal bintang tiga ini mengakui bahwa dirinya adalah anak metropolitan karena tumbuh besar di ibu kota. “Saya besar disini, dari SD Sampai dengan SMA Jakarta. SD saya itu di depan Mustopo, SMP saya di SMP 19 Mayestik, terus saya SMA nya di Tanah Kusir, SMA 47,” tuturnya.

Tidak banyak yang tahu awal kisah sosok yang akrab dipanggil Panca Putra saat akan menjadi seorang anggota Bhayangkara Polri, karena pada awalnya, pria yang sejak 8 September 2023 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI ini tidak memiliki keinginan khusus untuk masuk Akpol atau Akabri.

Sosok kakak laki-lakinya lah yang berperan dalam prosesnya menjadi seorang anggota Polri. “Karena kakak tidak lulus, ibu menyuruh saya untuk mencoba mendaftar tahun berikutnya, saat itu masih kelas 3 SMA. Saya gak ngurus surat-suratnya tapi mas saya yang siapin surat-suratnya. Saat itu, saya sibuk dengan ujian-ujian kelas tiga,” ucap pria yang masih berumur 18 tahun saat menjadi taruna.

Selesai menempuh pendidikan taruna di Magelang dan Semarang, Panca Putra mendapat penempatan pertamanya di Sulawesi Selatan. “Karena waktu dulu angkatan saya memang ada sedikit masalah, jadi kita dibuang semua, tidak boleh ada yang di Jawa. Waktu angkatan saya dapat rejeki durian runtuh, itu Poldapolda daerah sekali dapat terima 20–25 orang,” jelas perwira Polri yang telah dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama pada tahun 2021.

Sebagai seorang Perwira Pertama di Polres Polman, keras dan terasingnya Sulawesi membentuk sosok Panca Putra, mengingat saat itu dirinya belum begitu familiar dengan daerah di luar pulau Jawa. Salah satu tugas yang berkesan bagi dirinya adalah saat dirinya harus menjalani peran sebagai perwira piket, dengan jadwal piket selama 12 jam. Piket pagi dimulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam, sedangkan piket malam dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi keesokan harinya. Begitulah jadwal yang harus dia lalui.

Ketika ingin naik piket, Panca Putra menghadapi tantangan karena tidak

memiliki kendaraan, ditambah lagi di wilayah Polman saat menjelang sore sudah tidak ada kendaraan umum. Kendaraan yang lewat sebagian besar adalah truk pengangkut buah dan hasil pertanian. “Beda benar dengan Jakarta, jadi dari kecil saya sudah di Jakarta kaget. Ternyata Indonesia besar, dan masih banyak yang tertinggal,” jelasnya.

Setahun setelahnya, setelahnya Panca Putra mendapatkan amanat untuk menjabat sebagai Kanit Serse Ek Dit Serse Polda Sulawesi Selatan. Inilah awal bagi dirinya mendalami dunia reserse, hingga akhirnya mencapai pangkat Ajun Komisaris Polisi. Di tahun keenam Panca Putra berseragam coklat, dirinya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). “Saya masuk PTIK 2 tahun, tapi antara senang dan keder. Senangnya karena pulang ke Jakarta sekolah 2 tahun, kedernya masih belum punya apa-apa,” ujarnya diiringi gelak tawa.

Tahun 1997 hingga 1999 adalah periode ketika Panca Putra menyelesaikan pendidikan tersebut, dan pada tahun 1998, reformasi terjadi, yang dirinya alami langsung saat masih berada di kampus bilangan Jakarta Selatan. Selama masa itu, Panca Putra juga terlibat dalam situasi hidup di Jakarta, termasuk turut serta dalam kegiatan pengamanan, yang pada waktu itu cukup ramai dan penuh gejolak. “Tahun 98 reformasi, saya masih di kampus mengalami itu semuanya. Kita malah ikut nge-pam (pengamanan) itu dulu,” kenangannya.

Dengan berbagai dinamika yang dialaminya, Panca Putra menyelesaikan pendidikan di PTIK dengan posisi yang terbilang baik, tidak pernah di luar peringkat 10 besar dari ratusan peserta pendidikan. Dengan peringkat yang bagus memberikan dirinya hak untuk memilih lokasi penempatan dinas, namun keadaan berkata lain. “Saya dipanggil, (penempatan) gak usah di Jakarta, di tempat lain aja. Karena saya prajurit bhayangkara, prajurit gak pernah menolak perintah. Makanya saya jadi ditugaskan penempatan di Semarang, Jawa Tengah,” jelasnya yang kemudian menjabat sebagai Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

Tidak lama berselang, Panca Putra diangkat menjadi Komisaris Polisi dengan jabatan sebagai Kabag Serse Polwil Pati Polda Jateng. “Kalau saya dari Pama itu reserse terus, saya tidak pernah keluar

fungsi lain di Polri itu misalnya Lantas atau Ops, tapi saya jabatan reserse terus,” tuturnya. Dengan capaian prestasinya selama bertugas, pintu kesempatan terbuka lebar bagi dirinya untuk mengasah diri melalui beasiswa pendidikan S2 pada tahun 2001 hingga 2003.

Selama menempuh pendidikan inilah dirinya banyak berinteraksi dengan Irjen. Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Farouk Muhammad, S.H., MBA, MCJA yang saat itu menjabat sebagai Gubernur PTIK. “Waktu itu saya jadi ditunjuk jadi asdos mendampingi gubernur saya waktu itu Profesor Farouk Muhammad almarhum,” jelasnya. Saat itulah, Panca Putra berharap untuk bisa berdinasi di PTIK setelah lulus, namun, permintaannya ditolak.

Setelah lulus, dirinya harus menjalankan tugas lapangan terlebih dahulu. Setelahnya, dengan berbagai pertimbangan tersebut akhirnya Panca Putra mengisi jabatan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota. “Pak Almarhum Faruk hadir disitu waktu pembacaan penempatan manggil saya, beliau tanya kenapa di Jawa Barat begitu. Saya bilang, saya gak tau jenderal, penempatannya seperti itu. Oke, gak apa-apa kamu di Jawa Barat, nanti saya bikin surat kepada Kapolda-mu supaya kamu tidak usah jauh-jauh,” ungkapnya.

Dalam rentang waktu tersebutlah Panca Putra menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, tidak lama setelah itu, ia menjabat sebagai Wakapolres di Cilegon selama 2004-2005. Walaupun dirinya mengajar di PTIK sebagai asisten, Panca Putra tetap harus menjalankan tugasnya pada jabatan-jabatan teritorial.

Pasca menjabat Wakapolres Cilegon, ia mendapat kesempatan untuk menempuh Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, Panca Putra juga melangsungkan pernikahan dengan rekan sejawatnya, yang kemudian dikaruniai seorang putra. “Masuk Sespimmen di 2005, Desember saya nikah Januari tanggal 5 saya masuk sekolah. Waktu itu programnya Sespim setahun 2 kali, ini bulan madu saya sekolah,” tutur pria yang memiliki hobi bermain tenis.

Setelah lima bulan menjalani pendidikan, Panca Putra mendapatkan tugas di Sespim Lemdiklat Polri sebagai Kasubag Evadasi Bag Bindik Dit Akademik Sespim hingga kemudian mendapatkan kenaikan pangkat

Ajun Komisaris Besar Polisi pada tahun 2006. “Penempatan disitu, dapat pangkat Letkol-nya disitu, AKBP dua tahun lebih di Sespim Langsung jadi Kapolres Banyumas, anak saya lahir disitu, habis dari Banyumas pindah ke Kabupaten Tegal jadi Kapolres,” jelasnya dengan runtut.

Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 2011 Panca Putra mendapatkan amanat sebagai Wakil Direktur Reskrimsus di Jawa Tengah. Kemudian, ia dipindahkan ke Pulau Kalimantan sebagai Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Tengah, menghabiskan dua tahun sampai tahun 2014. Setelahnya, ia merasa sudah saatnya untuk masuk Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti). Pada tahun pertamanya mendaftar Sespimti karena beban tugas yang berat, sehingga kurangnya persiapan Panca Putra tidak lulus seleksi. “Saya berpikir kalau beban tugas saya terlalu berat, saya gak sempat belajar. Karena waktu itu tesnya bersamaan dengan orang daftar Lemhannas. Di polisi itu selalu semuanya sama, tesnya bareng. Nanti baru masuk Si A masuk Sespimti, Si B masuk Lemhannas, Si C masuk Diklatpim, semuanya harus proses seleksi dulu,” tuturnya.

Hal tersebut melatarbelakangi kepindahannya mengisi jabatan Dosen Utama STIK. Pada kesempatan itulah, Panca Putra mengajar sambil belajar hingga akhirnya berhasil dalam ujian seleksi Sespimti. “Setahun di Jakarta, itu saya langsung masuk Sespimti setelah belajar berdarah-darah. Kalau ga belajar mana bisa bagus, saya gak pernah pake apa-apa masuk sekolah, Alhamdulillah rezeki saya begitu,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sespimti, Panca Putra kembali berdinasi di PTIK, tetapi dirinya juga tetap disibukkan dengan berbagai tugas yang diterimanya langsung dari Kapolri. Salah satu tugas yang berkesan baginya adalah saat mendesain beberapa Rapim TNI-Polri. Sukses menyelesaikan berbagai tanggung jawab dan penugasan yang diberikan, pada tahun 2017 Panca Putra dipercaya untuk mengisi jabatan Wakil Direktur Tipidum Bareskrim Polri.

Salah satu kasus yang berkesan bagi Panca Putra adalah penyelesaian kasus pembunuhan warga negara Singapura oleh pekerja migran Indonesia. “Kita tangkap di Indonesia, tapi kan tempat kejadiannya di sana. Kalau bicaranya azas

hukum, undang-undang memungkinkan kita memproses warga negara kita yang melakukan tindak pidana di luar negeri, sepanjang negara itu juga mengizinkan. Saya dulu kasihan, dia diproses hukuman mati di sana,” tuturnya.

Pada tahun 2018, Panca Putra mendapat perintah untuk mengikuti tes jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jabatan Direktur Penyidikan. Meskipun awalnya tidak memiliki niat untuk masuk KPK, ia diterima setelah melewati serangkaian seleksi dan wawancara. “Saya dipanggil Pak Tito, disuruh ikut. Masuk tempat yang saya tidak begitu inginkan. Tentukan semua polisi Mau jadi Kapolda. Tapi perintahnya beliau saya harus serius tidak boleh main-main, tadi mau saya kalah-kalahkan,” tegasnya.

Selama empat bulan sebagai Direktur Penyidikan di KPK, Panca Putra akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat bintang satu-nya. “Pak deputy penindakan tau-tau beliau pulang ditarik pulang ke Mabes Polri. Kosong jabatan itu, maka saya jabat. Ada orang yang sejarahnya di KPK dua jabatan, saya jadi Pejabat Deputy penindakan, saya juga jadi Direktur Penyidikan,” ungkapnya.

Selama dua tahun lebih di KPK, ia berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk beberapa kasus yang melibatkan pesohor di pemerintahan. Dirinya mengakui bahwa situasi pada masa itu sangat dinamis, terutama seiring dengan pergantian kepemimpinan dan perubahan Undang-Undang KPK.

Pada Februari 2020 hingga Maret 2021, Panca Putra kembali ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespimti, dengan semangat untuk mengajar kembali. Selama tiga bulan berdinasi di Sespimti, kemudian dirinya diangkat menjadi Kapolda Sulawesi Utara. “Di Sespimti cuma tiga bulan, saya jadi Kapolda. Tapi seharusnya saya jadi bintang dua saat deputy di KPK,” jelasnya.

Saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara ada tantangan tersendiri bagi dirinya mengingat saat itu di tengah masa pandemi COVID-19. Di Manado, Panca Putra berhasil mengajak masyarakat menggunakan masker dengan menginisiasi Gerakan Sejuta Masker.

Masih pada masa pandemi COVID-19, Panca Putra dimutasi menjadi Kapolda Sumatera Utara, sebuah wilayah yang



menurutnya memiliki kultur yang cukup unik dan berbeda dari kebanyakan teritorial yang dipimpinnya. “Begitu saya pindah ke Sumut, begitu mendarat di Bandara Kuala Namu, saya lihat di sana apalagi jalan masuk Kota Medan. Sepertinya orang di Sumatera Utara tidak ada yang takut dengan COVID,” ungkapnya dengan gelak tawa.

Bisa dikatakan Panca Putra adalah Perwira Polri terlama yang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara dengan durasi selama dua tahun enam bulan. Selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugas tanpa menunda adalah prinsip yang diterapkan oleh dirinya. Ia menanamkan prinsip ini dengan menuntaskan seluruh beban kerja selama di kantor dan tidak membawanya pulang. Disiplin ini membantunya menghadapi setiap tantangan.

Perlu diakui bahwa karir Panca Putra yang mampu mencapai posisi jenderal bintang tiga di lingkungan Polri mengalir tanpa rencana khusus apalagi tendensi yang ambisius, semua prestasi didasarkan pada kecintaannya untuk menjalani setiap pengalaman dan tugas yang diberikan.

Sebagai seorang Sestama Lemhannas RI, Panca Putra mengaku bahwa dirinya memang belum pernah menempuh pendidikan di Lemhannas RI. Meski demikian Lemhannas RI bukanlah tempat yang asing baginya, Panca Putra dalam beberapa kesempatan mengunjungi Lemhannas RI untuk menyerap metode pembelajaran dan merancang kurikulum pendidikan untuk Sespimmen dan Sespimti.

Dengan mengadopsi metode dan modul yang berasal dari Lemhannas, dia memperkaya pengalaman pembelajaran di Lemdiklat Polri. Mengintegrasikan teknologi informasi dan penggunaan kertas kerja untuk penulisan naskah penugasan adalah konsep yang dimodifikasinya dari Lemhannas RI, termasuk pelajaran strategi nasional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pendekatan pembelajarannya.

“Karena di Sespim itu perlu diajari Sismennas, sebenarnya sudah ada Olah strategi namanya, tapi karena Sismennas itu bagus karena dia berbicara kepemimpinan tingkat nasional. Bagaimana membangun kerjasama dan kolaborasi serta pengambilan kebijakan dan keputusan negara, maka perlu diajarkan kepada para perwira-perwira Polri,” jelas Panca Putra. Dengan demikian para perwira tidak hanya menjalani tugasnya sebagai seorang polisi profesional, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memahami serta bersinergi dengan kebijakan strategis nasional.

Kini saat dirinya menjadi Pejabat Utama Lemhannas RI, dan bisa melihat lebih dalam, ada kegelisahan dan rasa sedih terbersit dalam diri Panca Putra. Lemhannas RI, bagi dirinya adalah lembaga yang mendidik pemimpin-pemimpin nasional luar biasa, kini mengalami stagnasi bahkan degradasi dalam beberapa aspek. “Lembaga yang punya nama dengan kredibilitas besar ini harus kita jaga. Baik dalam segala hal, tadi kalau yang mendidik

pemimpin sistem pembelajaran dan metode pembelajaran harus dibenahi termasuk juga materi-materinya,” ungkapnya.

Lebih dalam, pada bidang Kesestamaan, masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal anggaran dan sarana prasarana. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari unit-unit kerja. Pentingnya untuk berinovasi dan mengusulkan perubahan. Meskipun usulan tidak selalu diakomodasi, tetapi kemajuan memerlukan inisiatif. “Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dukungan anggaran kita kecil. Kenapa kita kecil? Kita harus tahu bahwa kita tidak mampu menyusun anggaran dengan baik. Yang saya minta semuanya harus sama-sama, tidak bisa disalahkan kepada Pak Karoren dan jajarannya saja Tapi di unit-unit kerja harus mau maju mengusulkan,” tegasnya.

Bagi Panca Putra dalam menyikapi dinamika nasional dan global saat ini, Lemhannas RI harus maju seiring dengan perkembangan zaman. Metode konvensional tidak lagi cukup, inovasi dan penyesuaian dengan kemajuan teknologi adalah kunci untuk menjadi center of excellent. “Apalagi tantangan kita mendidik para pemimpin nasional bagi Generasi Z. Nggak bisa lagi, menggunakan cara-metode konvensional. Kita semua harus maju, tapi pegang aturan, ikuti! Sesuaikan semuanya dengan baik,” tuturnya. Menurutnya, kondisi ideal tersebut dapat dicapai dengan dan tidak terlena pencapaian saat ini dan tetap menjaga komunikasi yang baik antareleman pada tiap tingkatan yang ada di Lemhannas RI.

Tantangan terbesar saat ini adalah mendidik para pemimpin generasi Z yang hidup di era digital. Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan mereka sendiri, bukan hanya menjadi konsumen teknologi. Keberhasilan dalam hal ini melibatkan adaptasi terhadap perubahan dan mengidentifikasi berbagai ketertinggalan dalam hal sistem kerja, sarana-prasarana, dukungan anggaran, keterampilan, dan pengetahuan. Semua aspek ini perlu segera diperbaiki guna menjaga nama besar Lemhannas RI. Mereka yang merasa besar dan enggan melihat perkembangan di luar akan tertinggal oleh zaman. Bagi Panca Putra kebanggaan bukan hanya bersifat pribadi, melainkan tentang menjaga citra dan reputasi Lemhannas RI sebagai lembaga unggulan.

Amara Ayu Gaga



ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Lahir di Pulau Dewata Bali, Amara Ayu Gaga dibesarkan di tengah keluarga yang sangat suportif. Dirinya menuturkan, kedua orang tuanya selalu mendukung setiap pilihan cita-citanya sedari kecil. “Sejak kecil saya tidak pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan. Amara kecil berkeinginan menjadi banyak profesi, seperti guru, dokter bahkan kasir swalayan,” jelasnya.

Namun, saat menempuh Pendidikan menengah atas, ia memantapkan tekadnya untuk menjadi seorang guru, khususnya guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menjadi guru PAUD membuat dirinya merasa lebih hidup karena melihat kesabaran para guru PAUD dalam mengajar. Di Tengah keinginan kuatnya untuk menjadi guru PAUD, orang tuanya ingin Amara berkuliah di PKN STAN. Hal tersebut diakuinya sempat membuatnya bimbang.

“Awalnya bingung dan maju mundur untuk mengikuti keinginan orang tua karena PKN STAN bukan keinginan saya, namun saya percaya keinginan orang tua pasti untuk kebaikan dan masa depan anaknya,” katanya.

Anak pertama dari empat bersaudara ini akhirnya lolos SPMB PKN STAN 2018 dengan jurusan kebidanan negara. Setelah menempuh Pendidikan di PKN STAN selama satu tahun, dirinya menjadi Calon ASN. Amara merasa sangat bersyukur karena dapat menjadi abdi negara, profesi yang mulia dan diidam-idamkan banyak orang. “Saya sangat bersyukur karena hanya berkuliah setahun bisa langsung mendapat kerja menjadi ASN tanpa harus mencari pekerjaan sana sini,” tuturnya.

Menjadi seorang ASN mungkin belum bisa dikatakan sebagai puncak

kesuksesan, namun untuk mencapai titik ini, menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama adalah motto hidup yang selalu dirinya pegang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Selain itu, Amara juga selalu melibatkan orang tua dan keluarga dalam hidup. “Banyak mimpi yang ingin saya raih untuk membuat orang tua saya bangga karena saya percaya untuk berada di posisi sekarang adalah jawaban dari doa-doa orang tua saya di sepertiga malamnya,” jelasnya.

Bagi Amara, pekerjaan sebagai abdi negara adalah pekerjaan yang sangat mulia. ASN memiliki fungsi salah satunya sebagai Pelaksana Kebijakan Publik yang telah tertuang pada UU nomor 20 tahun 2023. Maka dari itu, ia selalu mendukung implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Sebagai seorang ASN, Amara juga menekankan pada dirinya untuk selalu loyal kepada negara. “Dari kuliah saya ditanamkan satu hal yaitu siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia”, karena dimanapun saya bekerja tujuannya sama yaitu untuk memajukan Indonesia dengan menjadi ASN yang loyal terhadap negaranya,” ucapnya yakin.

Kedepannya, Amara berharap agar sumber daya manusia di Lemhannas RI dapat lebih diperhatikan. Dirinya berharap Lemhannas RI dapat menyediakan anggaran pengembangan kompetensi bagi setiap personel sehingga dapat menghasilkan personel unggul yang dapat mendukung tugas, pokok, dan fungsi Lemhannas RI secara optimal.



PERESMIAN PLTS CIRATA

Untuk Mendukung Industri Energi Hijau

Foto. indonesia.go.id

Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 9 November 2023. PLTS yang berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) ini merupakan salah satu PLTS terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia.

Presiden menyampaikan bahwa saat ini di Cirata sudah ada PLTA dengan kapasitas 1.000 megawatt kemudian ditambah dengan PLTS Terapung sebesar 192MWp. Ke depannya, jika dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1.000 megawatt peak.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa pembangunan PLTS Terapung di Cirata merupakan hasil kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN Persero, serta Masdar dari Uni Emirate Arab. Dengan teknologi yang telah ada, Presiden meyakini seluruh potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Saya ingin nantinya seluruh potensi EBT yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan dan saya yakin pasti bisa karena sekarang teknologinya sudah ada, misalnya di pembangkit surya ini juga ada pembangkit angin,” ujar Presiden.

Dalam proses pengembangan pembangkit listrik bertenaga surya maupun angin ini tentunya ada tantangan tersendiri, tetapi bisa diatasi dengan membangun smart grid yang menjaga listrik tetap stabil meskipun cuaca berubah-ubah.

“Solusinya dengan transmission line dan yang nantinya setiap potensi EBT di Sumatra, di Kalimantan, dan di Sulawesi bisa kita salurkan ke pusat-pusat ekonomi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa keberadaan PLTS sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung keperluan industri energi hijau.

“Memang permintaan untuk yang green energy untuk industri itu yang paling banyak karena semuanya pengen mendapatkan

produk-produk premium dari green energy,” tutur Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mendukung pembangunan EBT lain secara konsisten di Tanah Air.

“Kita harapkan akan makin banyak EBT yang dibangun di negara kita Indonesia, baik itu tenaga surya, hidropower, geotermal, tenaga angin. Saya kira kalau terus secara konsisten kita laksanakan seperti ini akan sangat baik,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa terdapat sejumlah investor asing lainnya yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan EBT di Tanah Air. Namun, Presiden menginginkan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap.

“Kalau (investor asing) yang antre banyak, tapi kita inginkan satu-satu, satu selesai bisa ditingkatkan lagi tidak semua kita terima. Tapi kita yang kedua ini mungkin agak gede lagi hidropower tapi memang belum final,” pungkasnya.

Sumber: indonesia.go.id

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP merupakan pertemuan para pihak pengambil keputusan tingkat tinggi mengenai permasalahan perubahan iklim. COP mengadakan pertemuan tahunan di negara-negara berbeda yang mana tahun ini merupakan pertemuan ke-28 (COP28).

COP28 dilaksanakan di Dubai Expo pada tanggal 30 November-12 Desember 2023. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo beserta rombongan menghadiri World Climate Action Summit (WCAS) COP28.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar, agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. “Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission,” ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam KTT COP28 ini, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang.

“Sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta,” ujar Presiden saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP28) di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Jumat, 1 Desember 2023.

Presiden Jokowi menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menurunkan emisi karbon. Kepala Negara menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan forest and other land use (FOLU).

Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal ini juga diikuti dengan pembangunan persemaian yang telah dilakukan dalam skala besar dan sudah mulai efektif untuk berproduksi.

Sementara dalam hal transisi energi, Presiden

menuturkan upaya Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan serta menurunkan penggunaan batu bara. “Pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioetanol, dan bioavtur juga semakin meluas,” tuturnya.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Presiden pun mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan nol karbon emisi pada 2060.

“Target Paris agreement and net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” tandasnya.

Sumber: Berbagai Sumber

Presiden Jokowi Hadiri COP28 dan Tegaskan Komitmen Indonesia Membangun Negara Makmur dan Berkelanjutan

Foto. presidenri.go.id



United Nations
Climate Change



COP28 UAE

Belakangan, spot wisata Lembah Harau menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, spot wisata Lembah Harau mirip dengan salah satu lokasi di lakon anime dan komik Naruto, yakni Konohagakure alias Desa Konoha.

Lembah Harau merupakan sebuah nagari yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Sesuai namanya, Lembah Harau merupakan sebuah lembah dengan luas sekitar 270,5 hektare yang dikelilingi pemandangan tebing-tebing tinggi menjulang, dengan ketinggian sekitar 100-500 meter.

Tebing-tebing itulah yang membuat banyak orang menyamakannya dengan Hokage Iwa atau Tebing Hokage yang ada di Desa Konoha, dalam komik dan anime Naruto.

Dalam kitab adat Minangkabau, Tambo, Kabupaten Lima Puluh Kota disebut sebagai negeri-negeri berair jernih dengan ikan-ikan jinak yang berenang di aliran sungainya. Konon, banyak yang meyakini bahwa di masa lalu Lembah Harau terletak di dasar lautan.

Hal tersebut didukung fakta ilmiah tentang jenis batuan di perbukitan Lembah Harau, yang merupakan batuan breksi dan

konglomerat. Jenis batuan tersebut umumnya terdapat di dasar laut.

Fakta menarik lainnya, sejumlah peneliti mengatakan, tebing batuan yang mengelilingi Lembah Harau diperkirakan telah berusia 40 juta tahun. Selain itu, tebing batuan di Lembah Harau juga banyak mengandung karbon organik, yaitu batuan yang terbentuk dari sisa-sisa organisme.

Melihat berbagai keunikan tersebut, tak heran jika Lembah Harau ditetapkan sebagai Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Salah satu satwa langka yang menghuni Lembah Harau adalah monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*).

Tidak hanya itu, di Lembah Harau juga ada jajaran air terjun yang berjumlah enam pancuran, yang dinamai Sarasah Aie Angek, Aie Luluih, Sarasah Jambu, Akar Berayun, Sarasah Bunta, dan Sarasah Murai. Setiap air terjun memiliki ciri khas dan tinggi yang bervariasi. Air Terjun Akar Berayun merupakan air terjun tertinggi di Lembah Harau dengan ketinggian sekitar 200 meter.

Begitu tiba di Lembah Harau kita bisa langsung melihat Air Terjun Akar Berayun karena lokasinya berdekatan dengan area parkir. Di bawah air terjun terdapat kolam besar yang kerap digunakan wisatawan untuk berenang atau bermain air.

Selain keindahan alam yang tak perlu diragukan lagi, Lembah Harau juga menyajikan beberapa wisata tematik kekinian. Paling baru adalah Harau Sky, yang menawarkan waterpark, restoran, spot foto, hingga penginapan di tengah Lembah Harau yang eksotis.

Tak hanya Harau Sky, di Lembah Harau juga kampung adat Minang di Kampung Sarosah, Kampung Korea Jepang, Kampung Eropa, Batang Tabik Waterpark, hingga Harau Dream Park.

Sumber: indonesia.go.id

Desa Konoha itu Bernama Lembah Harau

Foto: shutterstock

Perilaku tumbuhan putri malu (*Mimosa pudica*) yang menutup daunnya telah menggelitik para peneliti sejak lama. Saat disentuh, daunnya akan bergerak menangkup. Pada malam hari putri malu juga melakukan hal yang sama. Tanaman ini seperti tertidur. Daunnya baru mekar di keesokan harinya saat matahari kembali bersinar.

Lantas mengapa putri malu daunnya menutup saat disentuh? Salah satu hipotesa menyebutkan gerakan melipat daun itu untuk mengusir serangga yang hinggap di atasnya. Selain itu, karena tampak layu, ini bisa mengecoh satwa pemakan tumbuhan yang hendak memakannya untuk memilih tanaman lain yang terlihat lebih segar.

Beberapa orang pasti pernah mendapati bahwa tanaman ini kadang tidak bereaksi meski telah disentuh beberapa kali. Mengapa bisa begitu? Rupanya tanaman ini punya kemampuan membedakan mana gangguan yang membahayakan dan tidak. Ini berarti tanaman putri malu bisa belajar sekaligus mengingat.

Perilaku itu cukup mengejutkan para pakar biologi karena kemampuan belajar dan mengingat mirip binatang. Untuk membuktikannya, Monica Gagliano bersama tiga koleganya dari Australia dan Italia merancang percobaan untuk melatih ingatan putri malu, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Mengutip Sci News, mereka berhasil menunjukkan tanaman putri malu berhenti menutup daunnya ketika mengetahui bahwa gangguan yang berulang-ulang tidak menimbulkan dampak kerusakan yang berarti. Uniknya, tanaman ini mampu mengingat apa yang telah dipelajari selama masa percobaan,

bahkan setelah kondisi lingkungan berubah.

“Yang mengherankan, Mimosa dapat menunjukkan respons yang dipelajari bahkan ketika tidak diganggu di lingkungan yang lebih menguntungkan selama sebulan. Perubahan perilaku yang dipelajari dalam jangka waktu yang relatif lama sebagai hasil dari pengalaman sebelumnya ini cocok dengan efek pembiasaan yang terus-menerus diamati pada banyak hewan,” tulis para peneliti dalam laporan yang diterbitkan jurnal *Oecologia*.

Hasil penelitian mereka mempunyai implikasi besar yang bisa mengubah cara pandang atas batasan antara tumbuhan dan binatang, termasuk definisi tentang pembelajaran. “Tanaman mungkin tidak memiliki otak dan jaringan saraf, namun mereka memiliki jaringan sinyal berbasis

kalsium yang canggih di selnya mirip dengan proses memori hewan,” jelas mereka.

Seperti dikemukakan dalam laporan itu, dulu penelitian tentang kemampuan belajar dan mengingat yang merupakan bidang psikologi banyak menyoroti perilaku manusia. Selanjutnya berkembang hingga meneliti beberapa spesies hewan juga. Namun kini bahkan mesin pun bisa melakukan hal yang sama lewat teknologi kecerdasan buatan.

Maraknya penelitian yang sama terhadap tumbuhan agaknya hanya soal waktu. Seperti diketahui, kemampuan beradaptasi dengan mengolah informasi yang didapatkan dari lingkungan merupakan cara makhluk bertahan hidup. Berarti hal yang sama seharusnya lazim ditemukan pada tumbuhan.

Ternyata Putri Malu Punya Ingatan

Foto. nagwa.com



1



2

- 1 Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 pada Senin (30/10)
- 2 Pembukaan penataran istri dan suami peserta PPSA 24 pada Senin (2/10), di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lantai 1, Lemhannas RI.
- 3 Penandatanganan MoU antara Lemhannas RI dengan Rajaratnam School of International Studies Singapura pada Senin (16/10)





4

4 Pelaksanaan tes potensi akademik dan psikotes seleksi calon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 66 Senin (6/11)



5

5 Rangkaian Kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) - I Lemhannas RI di Singapura Selasa (7/11)



6

6 RTD tentang "Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Penerima Bantuan Iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Informal" Rabu (29/11)

7 Plt. Gubernur Lemhannas RI menerima Audiensi PT Brantas Abipraya, Selasa (5/12)

8 Lemhannas RI menerima kunjungan delegasi The Academy of Military Sciences Delegation of CPLA China, Senin (11/12)

9 Lemhannas RI memperoleh kategori Baik dalam Anugerah Meritokrasi 2023 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Kamis (7/12)



7



8



9



Segenap Keluarga Besar Lemhannas RI
mengucapkan

SELAMAT
Natal
&
Tahun Baru
2024





LEMHANNAS RI
KEMBALI MERAHAI KUALIFIKASI BADAN PUBLIK
INFORMATIF

ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

